



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 222 /PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177/PMK.05/2015

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  - b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga agar sejalan dengan perubahan proses bisnis penyusunan laporan keuangan dan dukungan teknologi informasi, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177/PMK.05/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. UAKPA;
  - b. UAPPA-W;
  - c. UAPPA-E1; dan/atau
  - d. UAPA.

- (3) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, dan DUB berdasarkan usulan kepala daerah, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (4) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/ Urusan Bersama; dan/atau
  - b. UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan/ Urusan Bersama.
- (5) Dengan mempertimbangkan keterbatasan jumlah satuan kerja, Kementerian Negara/Lembaga dapat menetapkan 1 (satu) UAPPA-W untuk seluruh jenis kewenangan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kementerian Negara/Lembaga menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.
- (2) Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah seluruh Laporan Keuangan ditelaah secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.

3. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

4. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2158

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP. 197109121997031001



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 222/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 177/PMK.05/2015 TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

MODUL PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN  
KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

DAFTAR ISI

BAB I	
STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	
A. UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	7
B. PENANGGUNG JAWAB UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	8
C. STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	9
BAB II	
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	
A. JENIS DAN PERIODE PELAPORAN	25
B. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	29
C. PENCATATAN DAN VERIFIKASI	33
D. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN	34
E. JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN	35
BAB III	
SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN	36
BAB IV	
ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	
A. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA	41
B. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPA-W	99
C. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPA-E1	160
D. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPA	223
BAB V	
PEDOMAN TELAAH LAPORAN KEUANGAN	290

BAB I  
STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Untuk mewujudkan penyajian Laporan Keuangan yang andal, akuntabel dan transparan, Kementerian Negara/Lembaga melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Salah satu unsur dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut adalah terbentuknya struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Berikut adalah struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan serta tugas-tugasnya secara umum.

A. UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan, Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri dari:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), termasuk UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama.
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), termasuk UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama.
3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1).
4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA).  
UAPPA-W tidak wajib dibentuk dalam hal:
  1. Kementerian Negara/Lembaga hanya terdiri dari Satuan Kerja pusat; atau
  2. Kementerian Negara/Lembaga yang dalam satu wilayah hanya terdapat 1 (satu) Satuan Kerja untuk tiap Eselon I.

Eselon 1 pada K/L	Satker		Kewajiban pembentukan UAPPA/B-W
	Jumlah	Jenis Kewenangan	
<b>Ilustrasi K/L WWW</b>			
A	2	KD	Wajib
B	3	KD	Wajib
C	4	KD	Wajib
D	5	KD	Wajib
E	3	KD	Wajib
<b>Ilustrasi K/L XXX</b>			
A	2	KD	Wajib
B	1	KD	Tidak Wajib
C	1	KD	Tidak Wajib
	1	DK	
	1	TP	
	1	UB	
D	2	KD	Wajib
	1	DK	Tidak Wajib
E	1	KD	Tidak Wajib
<b>Ilustrasi K/L YYY</b>			
A	1	KD	Tidak Wajib
B	1	KD	Tidak Wajib
C	1	KD	Tidak Wajib
D	1	KD	Tidak Wajib
E	1	KD	Tidak Wajib
<b>Ilustrasi K/L ZZZ</b>			
A	1	KD	Tidak Wajib

## B. PENANGGUNG JAWAB UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

### 1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

UAKPA merupakan unit akuntansi pada tingkat Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Anggaran) yang memiliki wewenang menguasai anggaran dan menyusun laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya. Penanggung jawab UAKPA adalah kepala Satuan Kerja/ kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama penanggung jawabnya adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### 2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)

a) UAPPA-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penyusunan Laporan Keuangan atas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. UAPPA-W dibentuk dengan menunjuk dan menetapkan kantor wilayah atau satuan kerja sebagai UAPPA-W. Penanggung jawab UAPPA-W adalah

kepala kantor wilayah atau kepala satuan kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA-W.

- b) UAPPA-W Dekonsentrasi merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA Dekonsentrasi yang berada di bawahnya. Setiap dinas pada pemerintah provinsi yang menerima alokasi dana dekonsentrasi ditunjuk dan ditetapkan sebagai UAPPA-W Dekonsentrasi. Penanggung jawab UAPPA Wilayah adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga.
- c) UAPPA-W Tugas Pembantuan/Urusan Bersama merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang berada di bawahnya.

Setiap dinas pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang menerima alokasi dana Tugas Pembantuan/Urusan Bersama ditunjuk dan ditetapkan sebagai UAPPA Wilayah Tugas Pembantuan/Urusan Bersama. Penanggungjawab UAPPA-W Tugas Pembantuan/Urusan Bersama adalah kepala dinas pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga.

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)

UAPPA-E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I, penanggung jawabnya adalah pejabat eselon I.

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA)  
UAPA merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran), penanggung jawabnya adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga.

C. STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Dengan adanya pembentukan dan penunjukan Unit akuntansi dan pelaporan keuangan, diperlukan adanya struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pencantuman struktur organisasi dalam modul ini merupakan

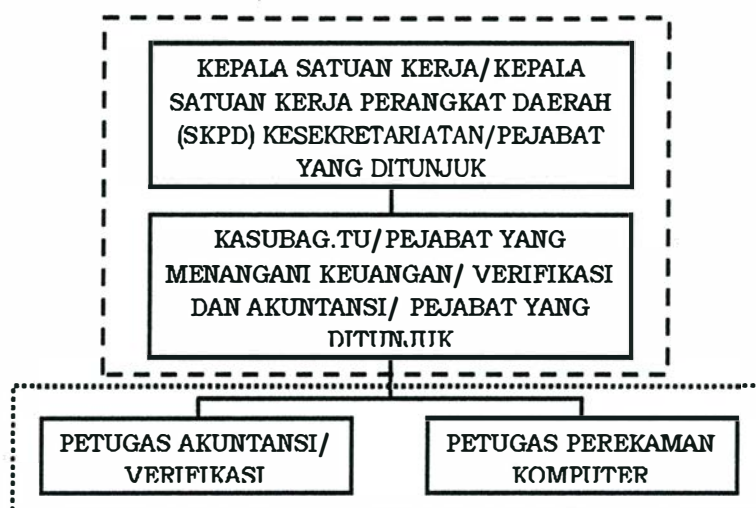


pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam pembentukan dan penunjukan unit akuntansi. Pembentukan struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan disesuaikan dengan struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga atau Pemerintah Daerah (untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan/Urusan Bersama).

Dalam modul ini hanya dicantumkan struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan sedangkan untuk unit akuntansi dan pelaporan barang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. UAKPA/UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/ Urusan Bersama



Keterangan:

 Penanggung Jawab

 Petugas Akuntansi Keuangan

Tugas pokok penanggung jawab UAKPA/UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama adalah menyelenggarakan akuntansi Keuangan di lingkungan Satuan Kerja, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan akuntansi keuangan;
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala;
- c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPA/UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Penanggung jawab UAKPA/UAKPA Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan/Urusan Bersama

1) Kepala Satuan Kerja/Kepala SKPD, Kepala Subbagian TU/pejabat yang menangani keuangan/verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
- b) Menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungannya;
- c) Mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem;
- f) Meneliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan;
- g) Menandatangani Laporan Keuangan UAKPA/UAKPA Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; dan
- h) Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA/UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang sudah ditandatangani ke KPPN, UAPPA-W/UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan/ Urusan Bersama dan UAPPA-E1.

2) Pejabat Eselon IV/Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangi Keuangan/Verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;



- b) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAKPA/UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
- d) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan;
- e) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan;
- f) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAKPA/UAKPA Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan/ Urusan Bersama yang akan didistribusikan.

b. Petugas Akuntansi Keuangan

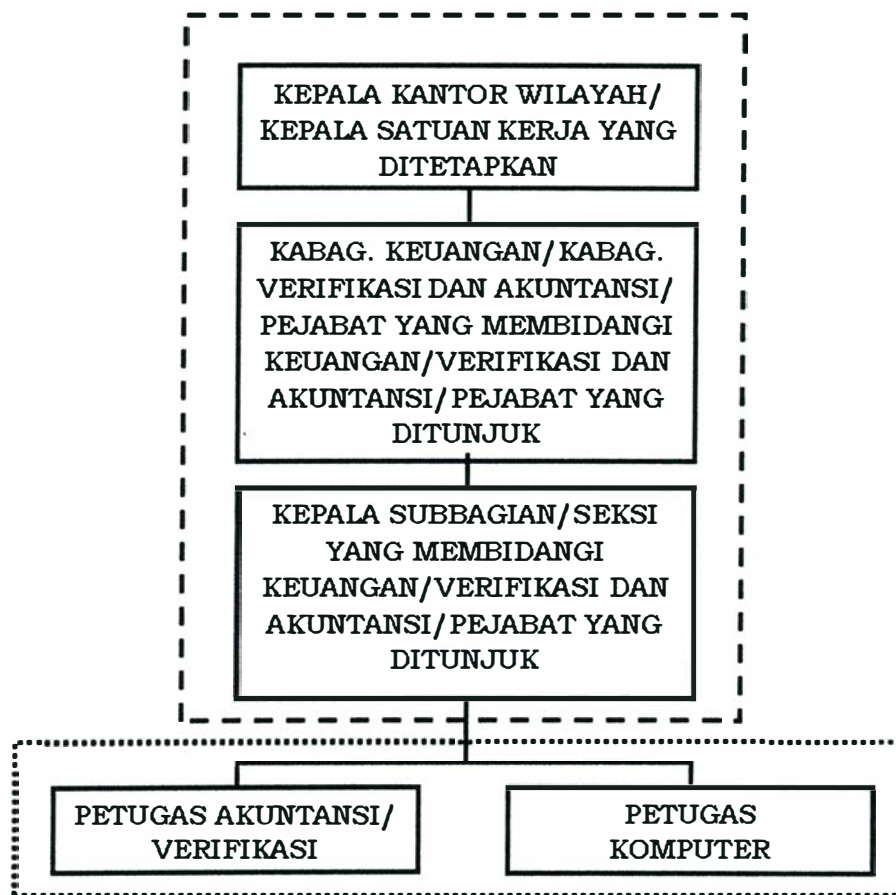
Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA/UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/ Urusan Bersama yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi;
- 2) Membukukan/menginput dokumen sumber ke dalam aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 3) Melakukan verifikasi atas jurnal transaksi/buku besar yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan dokumen sumber
- 4) Menerima data BMN dari petugas akuntansi barang;
- 5) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- 6) Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- 7) Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA/UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
- 8) Menelaah Laporan Keuangan tingkat UAKPA;
- 9) Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;
- 10) Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat

UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; dan

- 11) Memelihara arsip data

## 2. UAPPA-W



Keterangan:

 Penanggung Jawab

 Petugas Akuntansi Keuangan

Pada tingkat wilayah, Kementerian Negara/Lembaga menunjuk dan menetapkan Satuan Kerja sebagai UAPPA-W untuk unit vertikal instansi yang berada di wilayah/provinsi. Struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan untuk Satuan Kerja yang ditunjuk sebagai UAPPA-W disesuaikan dengan struktur organisasi Kementerian Negara/Lembaga.

Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-W adalah menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA-W dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan,

- b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala,
- c. Memantau pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-W melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab UAPPA-W
  - 1) Kepala Kantor Wilayah/Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA-W melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
    - a) Mengoordinasikan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan di lingkup UAPPA-W;
    - b) Mengoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
    - c) Menetapkan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup wilayahnya;
    - d) Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;
    - e) Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W;
    - f) Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
    - g) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
    - h) Mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan antara UAPPA-W dengan UAPPA-E1, UAPA dan Tim Bimbingan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
    - i) Menandatangani laporan keuangan dan Pernyataan Tanggung Jawab tingkat UAPPA-W ke UAPPA-E1; dan
    - j) Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke UAPPA-E1 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
  - 2) Kepala Bagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang membidangi Keuangan/Verifikasi dan

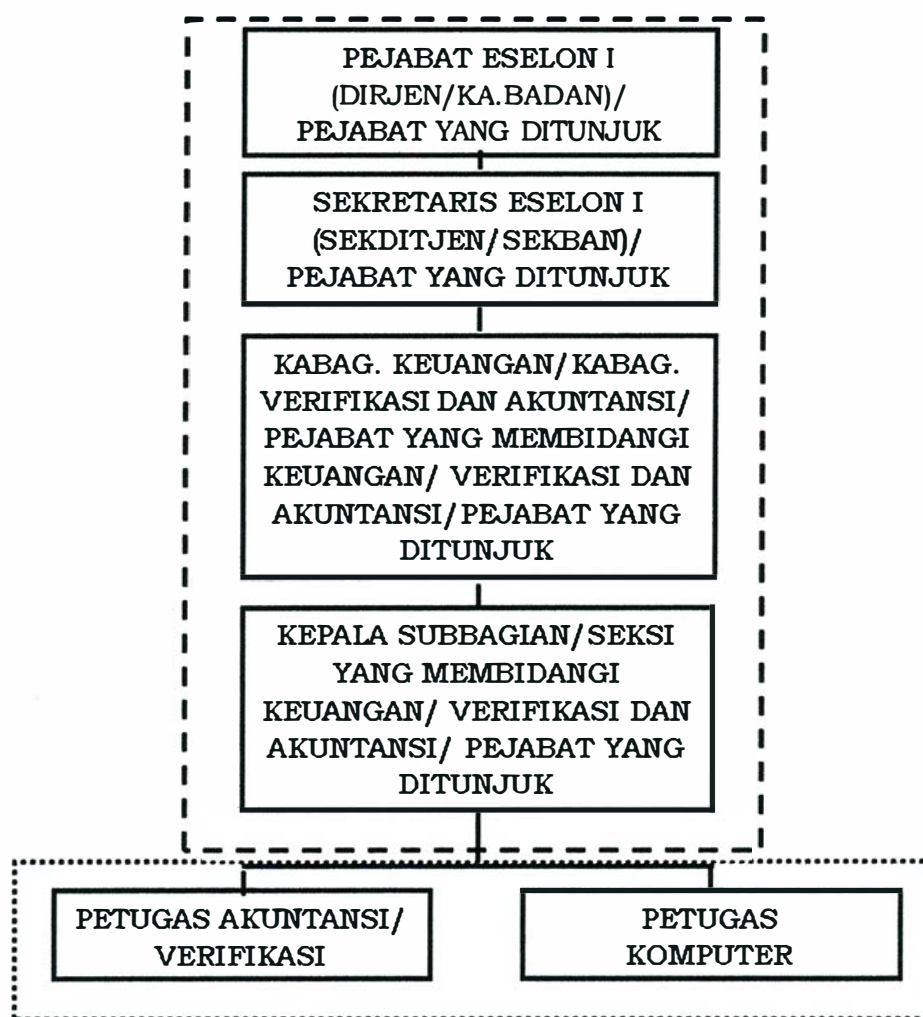
Akuntansi/pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W;
  - b) Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;
  - c) Menyetujui laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - d) Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-W dan tingkat UAKPA; dan
  - e) Menyetujui Laporan Keuangan tingkat wilayah yang akan disampaikan ke UAPPA-E1 sebelum ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah/Pejabat yang ditetapkan.
- 3) Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangi Keuangan/ Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
  - b) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Keuangan;
  - c) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W;
  - d) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang dengan Laporan Keuangan;
  - e) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-W yang akan didistribusikan; dan
  - f) Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W kepada UAPPA-E1 yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah/Pejabat yang ditetapkan.
- b. Petugas Akuntansi Keuangan
- Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-W melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari UAKPA;
  - 2) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan

Keuangan dengan Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

- 3) Menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W;
- 4) Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;
- 5) Menelaah Laporan Keuangan UAPPA-W; dan
- 6) Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-W.

### 3. UAPPA-E1



Keterangan:

 Penanggung Jawab

 Petugas Akuntansi Keuangan

Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-E1 adalah menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat unit eselon I dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala;  
dan
- c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-E1 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab UAPPA-E1
  - 1) Pejabat eselon I (Direktur Jenderal/Kepala Badan)/Pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
    - a) Mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup unit eselon I;
    - b) Mengoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-E1 sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
    - c) Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;
    - d) Menetapkan organisasi UAPPA-E1 sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Eselon I;
    - e) Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-E1;
    - f) Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
    - g) Mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan UAPPA-E1 dan Tim Bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
    - h) Menandatangani laporan keuangan dan pernyataan tanggung jawab tingkat UAPPA-E1 yang akan disampaikan ke Menteri/Pimpinan Lembaga;
    - i) Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-E1 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.



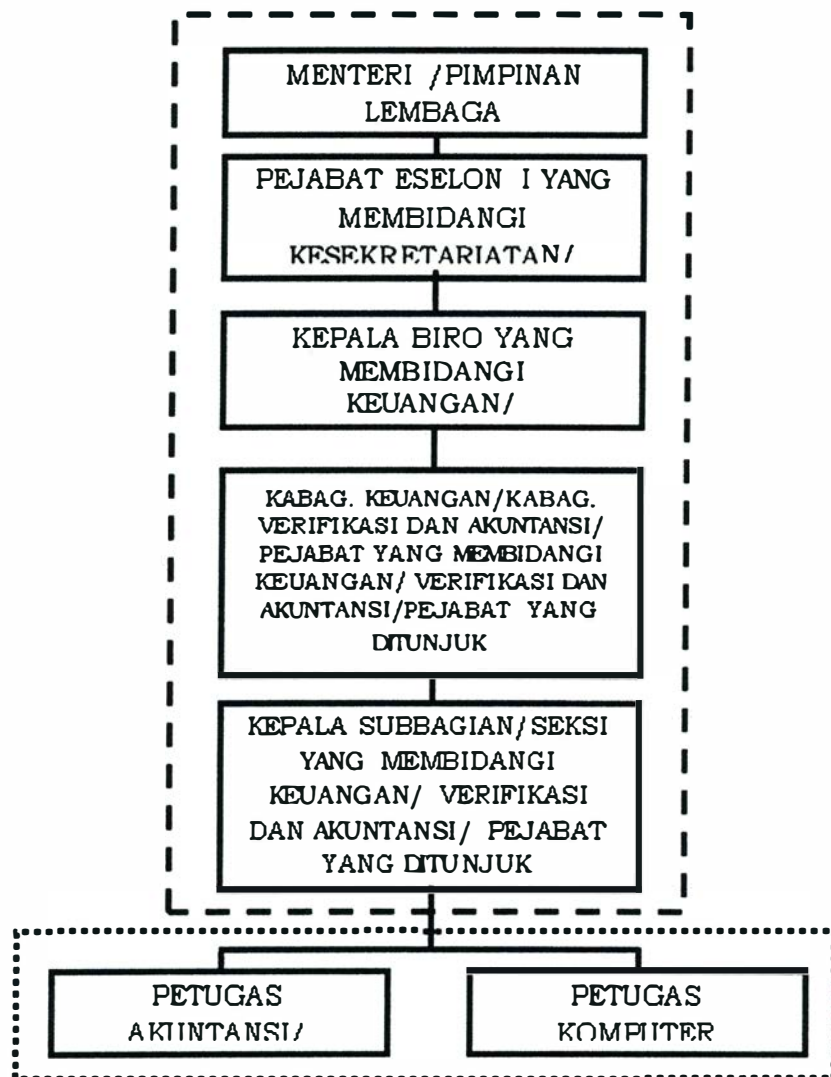
- 2) Sekretaris eselon I (Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan)/Pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a) Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Eselon I;
  - b) Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi UAPPA- E1;
  - c) Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;
  - d) Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA- E1; dan
  - e) Menyetujui Laporan Keuangan tingkat eselon I yang akan disampaikan ke UAPA, sebelum ditandatangani Dirjen/Kepala Badan/pejabat eselon I.
- 3) Kepala Bagian dan/atau Kepala Subbagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang membidangi keuangan/verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
  - b) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - c) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-E1;
  - d) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - e) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan Laporan Keuangan;
  - f) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA- E1 yang akan didistribusikan; dan
- b. Petugas Akuntansi Keuangan  
Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-E1 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari



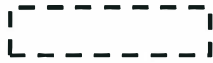
UAPPA-W dan/atau UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama dan/atau UAKPA Pusat dan/atau UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;

- 2) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- 3) Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1;
- 4) Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;
- 5) Menelaah Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1; dan
- 6) Menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1.

#### 4. UAPA



Keterangan:



Penanggung Jawab



Petugas Akuntansi Keuangan

Tugas pokok penanggung jawab UAPA adalah menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan akuntansi keuangan,
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala,
- c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPA melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Penanggung jawab UAPA

- 1) Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a) Membina dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
  - b) Membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada Pengguna Anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
  - c) Menetapkan organisasi UAPA sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - d) Membina pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
  - e) Menandatangani pernyataan tanggung jawab;
  - f) Menyampaikan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; dan
  - g) Menandatangani Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga semesteran dan tahunan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- 2) Pejabat eselon I dan/atau kepala biro yang membidangi keuangan/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan

sebagai berikut:

- a) Mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
  - b) Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
  - c) Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
  - d) Mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan UAPPA-E1 dan tim bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
  - e) Menyetujui Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelum ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga.
- 3) Kepala Bagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi atau Kepala Subbagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi atau pejabat yang membidangi keuangan/verifikasi dan akuntansi atau pejabat yang ditunjuk, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
  - b) Menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat pusat maupun daerah;
  - c) Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;
  - d) Memantau pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
  - e) Memberikan petunjuk kepada unit akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat pusat maupun daerah tentang hubungan kerja, sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal administratif lainnya;
  - f) Melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-

- unit akuntansi di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
- g) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang akan didistribusikan;
  - h) Mengoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan pendistribusiannya;
  - i) Mengevaluasi hasil kerja petugas akuntansi;
  - j) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan Laporan Keuangan;
  - k) Menyampaikan Laporan Keuangan UAPA ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga.

b. Petugas Akuntansi Keuangan

Petugas akuntansi pada tingkat UAPA yang terdiri dari Petugas Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari UAPPA-E1;
- 2) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- 3) Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPA;
- 4) Meneliti dan menganalisis laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkat UAPA untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;
- 5) Menelaah Laporan Keuangan tingkat UAPA;
- 6) Menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; dan
- 7) Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPA.

## BAB II

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kementerian Negara/Lembaga selaku pengguna anggaran dan barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan barang yang berada dalam tanggung jawabnya. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara serta mengatur Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara. Menteri Keuangan juga menghimpun Laporan Keuangan dan Laporan Barang dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan barang.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan Kementerian Negara/Lembaga meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disertai dengan Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran.

#### A. JENIS DAN PERIODE PELAPORAN

Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengikuti sistematika laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Bab III modul ini.

Jenis dan periode laporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

##### 1. Penyampaian Laporan Tingkat UAKPA ke KPPN

UAKPA dengan jenis kewenangan: Kantor Pusat (KP); Kantor Daerah (KD); Dekonsentrasi (DK); Tugas Pembantuan (TP); dan Urusan Bersama (UB).



NO	PERIODE PELAPORAN *)	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1)	Laporan Bulanan	LRA, LO, LPE dan Neraca	Disampaikan dalam bentuk pengunggahan data pada aplikasi berbasis web **)
2)	Laporan Semesteran Semester 1	Laporan Keuangan Semesteran - mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	• Cetak
3)	Laporan Tahunan	Laporan Keuangan Tahunan - mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	• Cetak

2. Penyampaian Laporan Tingkat UAKPA ke Tingkat UAPPA-W/UAPPA E1

NO	PERIODE PELAPORAN *)	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1)	Laporan Triwulanan	-	UAPPA-W mengunduh dari aplikasi berbasis web.
2)	Laporan Semesteran - Semester I	Laporan Keuangan Semesteran - mengikuti sistematika laporan keuangan Bab IV modul ini	• Cetak
3)	Laporan Tahunan - Tahunan <i>Unaudited</i> - Tahunan <i>Audited</i>	Laporan Keuangan Tahunan - mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	• Cetak

\*) sekurang-kurangnya

\*\*) aplikasi berbasis web antara lain E-Rekon&LK, SAKTI dan lainnya yang sedang diberlakukan.

3. Penyampaian Laporan Tingkat UAPPA-W ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan UAPPA-W dengan jenis kewenangan Kantor Daerah (KD); Dekonsentrasi (DK); Tugas Pembantuan (TP); dan Urusan Bersama (UB)

NO	PERIODE PELAPORAN *)	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1)	Laporan Triwulanan		Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengunduh dari aplikasi berbasis web.
2)	Laporan Semesteran Semester I	Laporan Keuangan Semesteran - mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	• Cetakan
3)	Laporan Tahunan - Tahunan <i>Unaudited</i> - Tahunan <i>Audited</i>	Laporan Keuangan Tahunan - mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	• Cetakan

4. Penyampaian Laporan Tingkat UAPPA-W ke Tingkat UAPPA-E1

NO	PERIODE PELAPORAN *)	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1)	Laporan Semesteran - Semester I	Laporan Keuangan Semesteran - mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	• Cetakan
2)	Laporan Tahunan - Tahunan <i>Unaudited</i> - Tahunan <i>Audited</i>	Laporan Keuangan Tahunan - mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	• Cetakan

\*) sekurang-kurangnya



5. Penyampaian Laporan tingkat UAPPA-E1 ke Tingkat UAPA

NO	PERIODE PELAPORAN *)	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1)	Laporan Semesteran - Semester I	Laporan Keuangan Semesteran - mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	• Cetakan
2)	Laporan Tahunan - Tahunan <i>Unaudited</i> - Tahunan <i>Audited</i>	Laporan Keuangan Tahunan - mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	• Cetakan

6. Penyampaian Laporan Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan

NO	PERIODE PELAPORAN *)	JENIS LAPORAN	KETERANGAN
1)	Laporan Semesteran - Semester I	Laporan Keuangan Semesteran - mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	• Cetakan • <i>Softcopy</i> dengan format .pdf
2)	Laporan Tahunan - Tahunan <i>Unaudited</i> - Tahunan <i>Audited (Asersi Final)</i>	Laporan Keuangan Tahunan - mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III modul ini	• Cetakan • <i>Softcopy</i> dengan format .pdf

\*) sekurang-kurangnya

Keterangan:

- 1) LRA yang disampaikan kepada UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA meliputi LRA Satuan Kerja/Wilayah/Eselon 1/Kementerian Negara/Lembaga (semesteran dan tahunan), LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan, LRA Pengembalian Pendapatan.

- 2) LRA semesteran yang disampaikan adalah LRA perbandingan antara LRA semester I tahun berjalan dengan LRA semester I tahun sebelumnya (realisasi sampai dengan 30 Juni 2XX1 dan realisasi sampai dengan 30 Juni 2XX0).
- 3) LO semesteran yang disampaikan adalah LO perbandingan antara LO semester I tahun berjalan dengan LO semester I tahun sebelumnya (periode sampai dengan 30 Juni 2XX1 dan periode sampai dengan 30 Juni 2XX0).
- 4) LPE semesteran yang disampaikan adalah LPE perbandingan antara LPE semester I tahun berjalan dengan LPE semester I tahun sebelumnya (periode sampai dengan 30 Juni 2XX1 dan periode sampai dengan 30 Juni 2XX0).
- 5) Neraca semesteran yang disampaikan adalah Neraca perbandingan antara Neraca per 30 Juni tahun berjalan dengan Neraca per 31 Desember tahun sebelumnya.

## B. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semesteran
  - a. LRA Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
  - b. LRA UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-W, dan/atau LRA UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan 30 Juni tahun anggaran berjalan.
  - c. LRA UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
  - d. LRA UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Semesteran sampai dengan 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahunan
  - a. LRA Tahunan Kementerian Negara/Lembaga disusun

berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

- b. LRA UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-W, dan/atau LRA UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan.
  - c. LRA UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Tahunan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
  - d. LRA UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Tahunan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
3. Laporan Operasional (LO) Semesteran
- a. LO Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
  - b. LO UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-W, dan/atau LO UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
  - c. LO UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
  - d. LO UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Semesteran sampai dengan 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
4. Laporan Operasional (LO) Tahunan
- a. LO Kementerian Negara/Lembaga Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31

Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

- b. LO UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-W, dan/atau LO UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan.
  - c. LO UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAKPA Tahunan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
  - d. LO UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Tahunan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Semesteran
- a. LPE Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
  - b. LPE UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAPPA-W dan/atau LPE UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
  - c. LPE UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
  - d. LPE UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahunan
- a. LPE Kementerian Negara/Lembaga Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.



- b. LPE UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil LPE UAPPA-W, dan/atau LPE UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
  - c. LPE UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAKPA Tahunan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
  - d. LPE UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Tahunan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
7. Neraca Semesteran
- a. Neraca Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAPPA-E1 per tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
  - b. Neraca UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAPPA-W dan/atau Neraca UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing per 30 Juni tahun anggaran berjalan.
  - c. Neraca UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA per tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
  - d. Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama per 30 Juni tahun anggaran berjalan.
8. Neraca Tahunan
- a. Neraca Kementerian Negara/Lembaga Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAPPA-E1 per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
  - b. Neraca UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAPPA-W dan/atau Neraca UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
  - c. Neraca UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil

penggabungan Neraca UAKPA per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

- d. Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

### C. PENCATATAN DAN VERIFIKASI

#### 1. Pencatatan dengan Penggunaan Aplikasi Komputer

Pencatatan transaksi keuangan pemerintah dilakukan hanya pada tingkat UAKPA berdasarkan dokumen sumber sehingga segala perbaikan pencatatan transaksi keuangan pemerintah sebagai hasil verifikasi oleh entitas akuntansi atau pelaporan pada tingkat yang lebih tinggi, hanya dilaksanakan pada tingkat UAKPA.

Pencatatan transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan jurnal dan buku besar sampai dengan penyajian laporan keuangan menggunakan aplikasi komputer yang dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan – Kementerian Keuangan.

#### 2. Verifikasi

Kegiatan verifikasi bertujuan untuk:

- a. memastikan keluaran aplikasi komputer sudah sesuai dengan dokumen sumber; dan
- b. memastikan bahwa ADK kirim Barang Milik Negara dari UAKPB hasil proses aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) sudah diterima di aplikasi SAIBA pada tingkat UAKPA sebagai penggabungan jurnal dan buku besar Aset Tetap dan Persediaan.

Proses berikutnya adalah mengubah data elektronik transaksi keuangan menjadi data elektronik akuntansi dengan menjalankan proses *posting* yang ada di program aplikasi komputer sehingga dapat membentuk buku besar sebagai dasar pembentukan Laporan Keuangan.

#### 3. Rekonsiliasi

Kegiatan rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Kegiatan rekonsiliasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Rekonsiliasi Internal

Kegiatan rekonsiliasi internal dilakukan pada tingkat UAKPA, yaitu:

- 1) Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang (UAKPA dengan UAKPB) dengan menjalankan prosedur rekonsiliasi internal yang ada di program aplikasi SAIBA. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai aset dan semua belanja terkait aset yang dilaporkan di program aplikasi SIMAK-BMN sesuai dengan yang dilaporkan di program aplikasi SAIBA;
- 2) Rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bendahara pengeluaran/ bendahara penerimaan Satker. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian jumlah kas di bendahara pengeluaran/ bendahara penerimaan dengan Neraca.

b. Rekonsiliasi Eksternal

Kegiatan rekonsiliasi dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis data tunggal (*single database*) dan dapat dilakukan hanya di tingkat UAKPA dengan UAKBUN-D/KPPN. Hasil rekonsiliasi dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

D. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan;
2. Untuk Laporan Keuangan Tahunan diatur sebagai berikut:
  - a. Laporan Keuangan *Unaudited* disampaikan paling lambat pada tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. Laporan Keuangan Tahunan Asersi Final akan ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan.



Dalam hal tanggal-tanggal tersebut merupakan hari libur/hari besar, Laporan Keuangan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

E. JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Unit Organisasi	Jadwal Penyampaian		
	Bulanan	LK Semester 1	LK Tahunan (Unaudited)
UAKPA	-	15 Juli 2XX0	22 Januari 2XX1
UAPPA-W	-	21 Juli 2XX0	5 Februari 2XX1
UAPPA-E1	-	26 Juli 2XX0	15 Februari 2XX1
UAPA	-	31 Juli 2XX0	Akhir Februari 2XX1

Keterangan:

- 1) Laporan Keuangan yang disampaikan ke unit akuntansi dan pelaporan keuangan di atasnya adalah Laporan Keuangan yang transaksi keuangannya direkonsiliasi/dikonfirmasi dengan KPPN.
- 2) Tahun 2XX0 adalah untuk tahun anggaran berjalan.
- 3) Tahun 2XX1 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berjalan.
- 4) Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan jadwal penyampaian Laporan Keuangan selain ketentuan di atas berdasarkan kebutuhan internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun kebutuhan tiap Kementerian Negara/Lembaga dengan tidak melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan semester I pada 31 Juli dan tahunan pada akhir Februari untuk UAPA.

## BAB III

### SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas.

Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga diarahkan untuk memenuhi prinsip Laporan Keuangan yang bertujuan umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan tidak dikhususkan untuk memenuhi kelompok pengguna tertentu. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu:

1. Pernyataan Telah Direviu (hanya untuk penyajian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/KL dan untuk periode semesteran dan tahunan)
2. Pernyataan Tanggung Jawab
3. Ringkasan Laporan Keuangan
4. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

5. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

6. Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

7. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.

8. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Selain itu, Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Struktur Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari:

a. Gambaran Umum Entitas

1) Dasar Hukum Entitas

Menjelaskan tentang domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada. Di samping itu, juga diungkapkan penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;

2) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Menjelaskan proses dan sistem akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan entitas.

3) Basis Akuntansi

Menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

4) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

5) Kebijakan Akuntansi

Menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

b. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos Pendapatan dan Belanja dengan struktur sebagai berikut:

- 1) Anggaran;
- 2) Realisasi;
- 3) Persentase pencapaian;
- 4) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
- 5) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 6) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 7) Rincian lebih lanjut pendapatan menurut sumber pendapatan;
- 8) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- 9) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 10) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

c. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:

- 1) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 2) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun-akun neraca;
- 3) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 5) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

d. Laporan Operasional

- 1) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 2) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 3) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;

- 4) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
  - 5) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
  - 6) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- e. Laporan Perubahan Ekuitas
- 1) Perbandingan dengan periode yang lalu;
  - 2) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun laporan perubahan ekuitas;
  - 3) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
  - 4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
  - 5) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- f. Pengungkapan Penting Lainnya
- Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
- 1) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
  - 2) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
  - 3) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
  - 4) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
  - 5) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.
- g. Lampiran dan Daftar
- Menyajikan informasi yang berisi rincian atas angka-angka yang disajikan pada LRA dan Neraca dan pengungkapan lainnya yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku termasuk Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Ikhtisar Badan Lainnya.
- h. Ikhtisar Laporan BLU
- i. Ikhtisar Laporan Badan Lainnya



## BAB IV

### ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

***Ilustrasi Laporan Keuangan berikut hanya merupakan contoh dan agar disesuaikan dengan karakteristik masing-masing entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan.***

#### A. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA

**KANTOR AKUNTANSI  
ISTIMEWA JAYAPURA**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal  
31 Desember 2016

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Papua, Januari 2017  
Kepala,

Mutiara, MBA

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

**KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA JAYAPURA  
GEDUNG YOS. SUDARSO, JL. JAYA WIJAYA NO 15 PAPUA  
TELEPON 0967 2263265, 6235234, FAXIMILE 096725081972**

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jayapura, Januari 2017  
Kepala,

Mutiara, MBA  
NIP 19750410 199703 1 001



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp335.000.000 atau mencapai 119,64 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp280.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp8.690.115.000 atau mencapai 91,81 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.465.000.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.339.145.000 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp688.075.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp71.070.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.380.000.000; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp200.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp128.200.000 dan Rp14.210.945.000.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp128.300.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.280.174.048 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.151.874.048. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp8.000.000 dan sebesar Rp77.675.000

sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp4.221.549.048.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp9.839.494.048 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp4.221.549.048 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp237.885.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.355.115.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp14.210.945.000.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA JAYAPURA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2016		% thd Angg	TA 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	280.000.000	335.000.000	119,64	325.000.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>280.000.000</b>	<b>335.000.000</b>	<b>119,64</b>	<b>325.000.000</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	825.000.000	810.000.000	98,18	798.000.000
Belanja Barang	B.4	2.990.000.000	2.683.000.000	89,73	2.213.000.000
Belanja Modal	B.5	5.550.000.000	5.097.115.000	91,84	3.115.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	100.000.000	100.000.000	100,00	70.000.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>9.465.000.000</b>	<b>8.690.115.000</b>	<b>91,81</b>	<b>6.196.000.000</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



**II. NERACA**

**KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA JAYAPURA  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	10.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	3.000.000	1.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	35.000.000	9.000.000
Piutang Bukan Pajak	C.4	65.000.000	55.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	36.000.000	24.000.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	12.000.000	9.600.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(3.250.000)	(1.830.000)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	114.000.000	152.320.000
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	3.200.000	5.200.000
Perseediaan	C.10	413.125.000	700.000.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>688.075.000</b>	<b>954.290.000</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	54.000.000	45.000.000
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	18.000.000	25.200.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	(930.000)	(845.000)
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>71.070.000</b>	<b>69.355.000</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	5.950.000.000	3.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.15	2.115.000.000	1.050.000.000
Gedung dan Bangunan	C.16	7.450.000.000	7.000.000.000
Jalan, Inggasi, dan Jaringan	C.17	340.000.000	50.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	90.000.000	90.000.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	375.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(2.940.000.000)	(2.324.630.952)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>13.380.000.000</b>	<b>8.865.369.048</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	180.000.000	20.000.000
Aset Lain-Lain	C.22	145.000.000	110.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(125.000.000)	(60.000.000)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>200.000.000</b>	<b>70.000.000</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>14.339.145.000</b>	<b>9.959.014.048</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	10.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	35.000.000	12.000.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	13.000.000	18.500.000
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	70.200.000	89.020.000
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>128.200.000</b>	<b>119.520.000</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>128.200.000</b>	<b>119.520.000</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	14.210.945.000	9.839.494.048
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>14.210.945.000</b>	<b>9.839.494.048</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>14.339.145.000</b>	<b>9.959.014.048</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA JAYAPURA  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	128.300.000	125.000.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>128.300.000</b>	<b>125.000.000</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	815.300.000	800.000.000
Beban Persediaan	D.3	451.000.000	415.000.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	610.000.000	655.000.000
Beban Pemeliharaan	D.5	497.000.000	513.177.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	790.000.000	780.000.000
Beban Barang untuk Di serahkan kepada Masyarakat	D.7	345.000.000	425.000.000
Beban Bantuan Sosial	D.8	100.000.000	70.000.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	670.369.048	522.191.548
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	1.505.000	1.300.500
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>4.280.174.048</b>	<b>4.181.669.048</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(4.151.874.048)</b>	<b>(4.056.669.048)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	12.000.000	8.000.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(5.500.000)	(5.000.000)
Defisit Selisih Kurs		(2.500.000)	(4.500.000)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4.000.000	
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>8.000.000</b>	<b>(1.500.000)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(4.143.874.048)</b>	<b>(4.058.169.048)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNB	D.12	7.325.000	6.500.000
Beban Perjalanan Dinas		(30.000.000)	(17.500.000)
Beban Persediaan		(55.000.000)	(68.000.000)
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(4.221.549.048)</b>	<b>(4.058.169.048)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA JAYAPURA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2016	2015
EKUITAS AWAL	E.1	9.839.494.048	7.895.650.450
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.221.549.048)	(4.058.169.548)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	42.500.000
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	277.885.000	215.850.000
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	(125.000.000)	(125.000.000)
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(30.000.000)	47.500.000
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	115.000.000	16.500.000
JUMLAH		<b>237.885.000</b>	<b>197.350.000</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	8.355.115.000	5.804.663.146
EKUITAS AKHIR	E.5	<b>14.210.945.000</b>	<b>9.839.494.048</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Akuntansi

#### Istimewa Jayapura

Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis

Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Jaya Wijaya No.15, Jayapura, Papua.

Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura berkomitmen dengan visi "***mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.***" Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.

- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

#### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

#### **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau

4



dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

*Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

*Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan

dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendaharapengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada

tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/ Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/ TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

##### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama

dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70



- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2016	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	235.000.000	235.000.000
Pendapatan Lain-lain	45.000.000	45.000.000
Jumlah Pendapatan	280.000.000	280.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	800.000.000	826.000.000
Belanja Barang	3.800.000.000	2.990.000.000
Belanja Modal	4.000.000.000	5.560.000.000
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	100.000.000
Jumlah Belanja	8.400.000.000	9.465.000.000

### Realisasi

#### Pendapatan

Rp335.000.000

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp335.000.000 atau mencapai 119,64 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp280.000.000. Pendapatan Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	280.000.000	291.000.000	103,93
Pendapatan Lain-lain	-	44.000.000	-
Jumlah	280.000.000	335.000.000	119,64

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2016 mengalami kenaikan 2,83 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan (jasa) akuntansi yang

berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura. Selain itu, Pendapatan Lain-lain Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura mengalami kenaikan sebesar 4,76 persen yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI TA. 2016	REALISASI TA. 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	291.000.000	283.000.000	2,83
Pendapatan Lain-lain	44.000.000	42.000.000	4,76
Jumlah	335.000.000	325.000.000	3,08

*Realisasi Belanja* **B.2 Belanja**

*Negara*

*Rp8.690.115.000*

Realisasi Belanja instansi pada TA 2016 adalah sebesar Rp8.690.115.000 atau 91,81% dari anggaran belanja sebesar Rp9.465.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016*

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	825.000.000	835.000.000	101,21
Belanja Barang	2.990.000.000	2.683.000.000	89,73
Belanja Modal	5.650.000.000	5.097.115.000	91,81
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	100.000.000	100,00
Total Belanja Kotor	9.465.000.000	8.715.115.000	92,03
Pengembalian		(25.000.000)	-
Jumlah	9.465.000.000	8.690.115.000	91,81

Dibandingkan dengan TA 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 40,25% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2016,
2. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja bantuan sosial untuk penduduk daerah terpencil dan perbatasan negara yang mempunyai kerawanan sosial.



*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	810.000.000	798.000.000	1,50
Belanja Barang	2.683.000.000	2.213.000.000	21,24
Belanja Modal	5.097.115.000	3.115.000.000	63,63
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	70.000.000	42,86
Jumlah	8.690.115.000	6.196.000.000	40,25

*Belanja Pegawai*  
*Rp810.000.000*

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp810.000.000 dan Rp798.000.000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,5 persen dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi PNS.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	320.000.000	301.000.000	6,31
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	220.000.000	205.700.000	6,95
Belanja Honorarium	174.000.000	165.000.000	5,45
Belanja Lembur	53.000.000	53.000.000	-
Belanja Vokasi	38.000.000	58.300.000	(34,82)
Jumlah Belanja Kotor	835.000.000	813.000.000	2,71
Pengebalan Belanja Pegawai	(25.000.000)	(15.000.000)	66,67
Jumlah Belanja	810.000.000	798.000.000	1,50

*Belanja Barang*  
*Rp2.683.000.000*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.683.000.000 dan Rp2.213.000.000. Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan

21,24% dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja perjalanan dinas dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sepanjang tahun 2016.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	372.000.000	641.300.000	(41,89)
Belanja Barang Non Operasional	129.000.000	98.700.000	30,70
Belanja Jasa	560.000.000	410.000.000	34,15
Belanja Pemeliharaan	497.000.000	339.000.000	46,61
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	790.000.000	698.000.000	32,11
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	345.000.000	126.000.000	173,81
Jumlah Belanja Kotor	2.683.000.000	2.213.000.000	21,24
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.683.000.000</b>	<b>2.213.000.000</b>	<b>21,24</b>

*Belanja Modal*

Rp5.097.115.000

**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.097.115.000 dan Rp3.115.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 63,63% dibandingkan TA 2015 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi, berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	2.950.000.000	1.500.000.000	96,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	822.115.000	750.000.000	9,02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	875.000.000	525.000.000	66,67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	290.000.000	200.000.000	45,00
Belanja Modal Lainnya	160.000.000	140.000.000	14,29
Jumlah Belanja Kotor	5.097.115.000	3.115.000.000	63,63
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.097.115.000</b>	<b>3.115.000.000</b>	<b>63,63</b>

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.950.000.000 dan Rp1.500.000.000. Realisasi tersebut pada TA 2016



mengalami kenaikan sebesar 96,67 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2016	REALISASI TA. 2015	Naik (Turun)%
Belanja Modal Tanah	2.300.000.000	1.100.000.000	109,09
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	230.000.000	110.000.000	109,09
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	90.000.000	60.000.000	50,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	200.000.000	150.000.000	33,33
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	130.000.000	80.000.000	62,50
Jumlah Belanja Kotor	2.950.000.000	1.500.000.000	96,67
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	2.950.000.000	1.500.000.000	96,67

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah sebesar Rp822.115.000, mengalami kenaikan sebesar 9,62 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014 sebesar Rp750.000.000. Hal ini disebabkan oleh penambahan gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN)%
Komputer Lihit	598.700.000	400.000.000	49,68
Peralatan Komputer	223.415.000	350.000.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	822.115.000	750.000.000	9,62
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	822.115.000	750.000.000	9,62

**B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp875.000.000 dan R525.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 40 persen dibandingkan Realisasi TA 2015. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari penambahan tiga ruang kelas di sisi kanan bangunan yang telah ada dan ruang kelas tersebut digunakan untuk kegiatan pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan.



*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	875.000.000	525.000.000	40,00
Jumlah Belanja Kotor	875.000.000	525.000.000	40,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>875.000.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>40,00</b>

**B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp290.000.000 dan Rp200.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 45,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2015. Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	260.000.000	180.000.000	44,44
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	30.000.000	20.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	290.000.000	200.000.000	45,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>290.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>45,00</b>

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp160.000.000 dan Rp140.000.000. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 14,29 persen dibandingkan Realisasi TA 2015. Hal ini disebabkan pengadaan *software* untuk mendukung implementasi akuntansi pendapatan berbasis akrual.

*Belanja Bantuan  
Sosial  
Rp100.000.000*

**B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp100.000.000 dan Rp70.000.000. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat

selektif. Realisasi tersebut pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 42,86% dibandingkan TA 2015. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI TA. 2016	REALISASI TA. 2015	NAIK (TURUN) %
Keompok Pendidikan Jaya Maju	60.000.000	50.000.000	20,00
Keompok Pendidikan Cerdas awas II	40.000.000	20.000.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor	100.000.000	70.000.000	42,86
Penyembelian	-	-	-
Jumlah Belanja	100.000.000	70.000.000	42,86

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp10.000.000

#### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2016 dan 2015*

Keterangan	TH 2016	TH 2015
Uang Tunai	3.000.000	-
Bank BERSAMA No acc 82111285163	7.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>

Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp3.000.000

#### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp3.000.000 dan Rp1.000.000. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2016 dan 2015*

Keterangan	TH 2016	TH 2015
Uang Tunai	1.000.000	750.000
Bank BERSAMA No acc 82111487451	2.000.000	250.000
<b>Jumlah</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp35.000.000

#### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp35.000.000 dan Rp9.000.000.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam



jangka waktu 3 bulan atau kurang sejangka waktu pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015*

Keterangan	TH 2016	TH 2015
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.000.000	1.500.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	12.500.000	2.000.000
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	17.500.000	5.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>35.000.000</b>	<b>9.000.000</b>

*Piutang PNBP*  
*Rp65.000.000*

**4 Piutang PNBP**

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp65.000.000, dan Rp55.000.000. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBP TA 2016 dan 2015*

Uraian	TH 2016	TH 2015
Piutang PNBP	55.000.000	50.000.000
Piutang Lainnya	10.000.000	5.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>65.000.000</b>	<b>55.000.000</b>

*Bagian Lancar*  
*Tagihan TP/TGR*  
*Rp36.000.000*

**5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp36.000.000 dan Rp24.000.000. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejangka waktu pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015*

No	Nama	TH 2016	TH 2015
	Jacobus	12.000.000	-
2	Martiana	-	3.000.000
3	Gerard	9.000.000	9.000.000
4	Remedy	6.000.000	6.000.000
5	Jessica	3.000.000	-
6	Yoga	6.000.000	6.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>36.000.000</b>	<b>24.000.000</b>

Bagian Lancar  
TPA  
Rp12.000.000

**C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp12.000.000 dan Rp9.600.000. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA TA 2016 dan 2015*

No	Nama	TH 2016	TH 2015
1	Yohana	3.000.000	3.000.000
2	Patrik	3.600.000	-
3	Armando	2.400.000	2.400.000
4	Jaka S.	3.000.000	3.000.000
5	Rianti C.	-	1.200.000
<b>Jumlah</b>		<b>12.000.000</b>	<b>9.600.000</b>

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Lancar  
Rp 3.250.000

**C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp3.250.000 dan Rp1.830.000.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar  
TA 2016 dan 2015

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	44.736.900	0,50%	250.000
Kurang Lancar	20.263.100	10%	2.100.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	66.000.000		2.350.000
<b>Bagian Lancar TP/GR</b>			
Lancar	30.000.000	0,50%	150.000
Kurang Lancar	5.000.000	10%	500.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	35.000.000		650.000
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	10.000.000	0,50%	50.000
Kurang Lancar	2.000.000	10%	200.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	12.000.000		250.000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	112.000.000		3.250.000

Belanja Dibayar di Muka  
Rp114.000.000

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp114.000.000 dan Rp152.320.000. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2016 dan 2015

Jenis	TH 2016	TH 2015
Pembayaran Internet	20.000.000	23.500.000
Pembayaran Sewa Perabotan dan Mesin	40.000.000	74.000.000
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	54.000.000	54.820.000
Jumlah	114.000.000	152.320.000

Pendapatan yang Masih Harus Diterima  
Rp3.200.000

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp3.200.000 dan Rp5.200.000, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus  
Diterima TA 2016 dan 2015*

Jenis	TH 2016	TH 2015
Pendapatan Jasa Pelatihan	1.450.000	3.000.000
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	1.750.000	2.200.000
<b>Jumlah</b>	<b>3.200.000</b>	<b>5.200.000</b>

*Persediaan*

*Rp413.125.000*

**C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp413.125.000 dan Rp700.000.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015*

Jenis	TH 2016	TH 2015
Barang Konsumsi	114.870.000	375.000.000
Barang untuk Pemeliharaan	124.700.000	150.000.000
Suku Cadang	92.565.000	90.000.000
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	30.000.000	-
Persediaan Lainnya	50.990.000	85.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>413.125.000</b>	<b>700.000.000</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp500.000 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

*Tagihan TP/TGR*

*Rp54.000.000*

**C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp54.000.000 dan Rp45.000.000. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu

kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2016 dan 2015*

No	Debitur	TH 2016	TH 2015
1	Jacobus	24.000.000	-
2	Martiana	-	3.000.000
3	Karel	9.000.000	18.000.000
4	Darma	6.000.000	12.000.000
5	Tri Priyatno	9.000.000	-
6	Rudianto	6.000.000	12.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>54.000.000</b>	<b>45.000.000</b>

Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp18.000.000

### C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp18.000.000 dan Rp25.200.000. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA TA 2016 dan 2015*

No	Debitur	TH 2016	TH 2015
1	Yohana	6.000.000	9.000.000
2	Patrik	3.600.000	-
3	Irfan EP	2.400.000	4.800.000
4	Faras	6.000.000	9.000.000
5	Rianti C.	-	2.400.000
<b>Jumlah</b>		<b>18.000.000</b>	<b>25.200.000</b>

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih -  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp930.000

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp930.000 dan Rp845.000. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:



Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2016

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk. Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan T P/T O R</b>			
Lancar	50.000.000	0,30%	230.000
Kurang Lancar	4.000.000	10%	400.000
Diragukan	-	30%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>64.000.000</b>		<b>630.000</b>
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	16.000.000	0,30%	50.000
Kurang Lancar	2.000.000	10%	200.000
Diragukan	-	30%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>18.000.000</b>		<b>280.000</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>72.000.000</b>		<b>980.000</b>

Tanah

Rp5.950.000.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp5.950.000.000 dan Rp3.000.000.000. Kenaikan nilai aset tetap Tanah berasal dari pembelian tanah di Tahun 2016. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	3.000.000.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	3.075.000.000
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	(125.000.000)
Penyisihan pengadlan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>5.950.000.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2016

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	5.000 m2	Jl Cenderawasih No. 5, Jayapura	1.000.000.000
2	2.000 m2	Jl. Matoa No 17, Jayapura	500.000.000
3	3.000 m2	Jl. Kanguru No 28, Jayapura	750.000.000
4	10.000 m2	Jl. Gunung Itan no. 24, Jayapura	3.700.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>6.950.000.000</b>

Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di Jl.Matoa NO.17, Jayapura, pada tanggal pelaporan dikuasai/ digunakan oleh pihak ketiga.

Peralatan dan  
Mesin  
Rp2.115.000.000

### C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp2.115.000.000 dan Rp1.050.000.000. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	1.050.000.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	812.215.000
Hibah Barang	98.000.000
Transfer Masuk	137.000.000
Koreksi tambah	27.785.000
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	(10.000.000)
Saldo per 31 Desember 2016	2.115.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(853.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	1.262.000.000

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian komputer unit berupa PC senilai Rp700.000.000; dan
- Pembelian peralatan komputer berupa printer senilai Rp112.215.000.
- Koreksi tambah berasal dari koreksi atas saldo awal dengan total Rp27.785.000
- Penerimaan hibah alat angkut darat bermotor berupa kendaraan bermotor roda 2 senilai Rp98.000.000.
- Transfer Masuk peralatan kantor sebesar Rp137.000.000

Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan sebuah mesin genset yang sudah dalam kondisi rusak berat senilai Rp50.000.000 dan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan  
Bangunan  
Rp7.450.000.000

### C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp7.450.000.000 dan Rp7.000.000.000.



Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	7.000.000.000
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	450.000.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2016	7.450.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(1.953.750.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	5.496.250.000

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari penambahan gedung tempat kerja berupa tiga ruang kelas di sisi kanan gedung induk senilai Rp450.000.000.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi  
Rp340.000.000*

#### C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp340.000.000 dan Rp50.000.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	50.000.000
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	290.000.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2016	340.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(91.250.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	248.750.000

Mutasi tambah:

- Berupa pengembangan jaringan teknologi informasi dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp90.000.000*

#### C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah

Rp90.000.000 dan Rp90.000.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2016, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015</b>	<b>90.000.000</b>
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>90.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	(42.000.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>48.000.000</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp375.000.000*

#### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp375.000.000 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Pembangunan Gedung tersebut sesuai Kontrak No.02/KPA.KAI/VII/2016 tanggal 09 Juli 2016 dengan nilai Rp500.000.000 dengan sumber dana rupiah murni. Pada tanggal pelaporan penyelesaian gedung tersebut telah mencapai 75%.

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp2.940.000.000*

#### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp2.940.000.000 dan Rp2.324.630.952. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2016 dan 2015

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralalatan Mesin	2.115.000.000	853.000.000	1.262.000.000
2	Gedung dan Bangunan	7.460.000.000	1.953.750.000	5.406.250.000
3	Jalan, ligasi dan Jaringan	340.000.000	91.250.000	248.750.000
4	Aset Tetap Lainnya	90.000.000	42.000.000	48.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.995.000.000	2.940.000.000	7.055.000.000

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak

Berwujud

Rp180.000.000

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp180.000.000 dan Rp20.000.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	20.000.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	160.000.000
Mutasi kurang:	.
Saldo per 31 Desember 2016	180.000.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2016	(48.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	134.000.000

Mutasi tambah:

- Pembelian berupa aplikasi penatausahaan PNBPN senilai Rp100.000.000
- Penambahan fitur pada MOYB Accounting Profesional senilai Rp60.000.000.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:



Rincian Aset Tak berwujud TA 2016

Uraian	Nilai Perolehan
Aplikasi Penatausahaan PNPB	100.000.000
MOYB Accounting Profesional	80.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>180.000.000</b>

Aset Lain-Lain  
Rp145.000.000

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp145.000.000 dan Rp110.000.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	110.000.000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	50.000.000
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- penghapusan BMN	(15.000.000)
Saldo per 31 Desember 2016	145.000.000
Akumulasi Penyusutan	(79.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	66.000.000

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan adalah dari reklasifikasi mesin genset yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp50.000.000.
- Penghapusan Alat Angkut Darat Bermotor berupa kendaraan bermotor roda 2 senilai Rp15.000.000.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing



Rp125.000.000 Rp125.000.000 dan Rp60.000.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	180.000.000	46.000.000	134.000.000
Jumlah	180.000.000	46.000.000	134.000.000
Aset lain-lain	145.000.000	79.000.000	66.000.000
Jumlah	325.000.000	125.000.000	200.000.000

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari  
KPPN  
Rp10.000.000

**C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp35.000.000

**C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp35.000.000 dan Rp12.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Akuntansi

Istimewa Jayapura per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pendapatan Jasa Giro yang belum dise-kr	20.000.000	Pendapatan Jasa Giro belum dise-kr ke kas negara
Pokongan pajak yang belum dise-kr	3.000.000	Pokongan pajak belanja UP belum dise-kr ke kas negara
Utang kepada Pihak ke-3 lainnya	12.000.000	Dana yang belum dibagikan ke pegawai yang berhak
<b>Total</b>	<b>35.000.000</b>	

*Pendapatan*

*Diterima di Muka  
Rp13.000.000*

**C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp13.000.000 dan Rp18.500.000. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah
PT Pradnya Consultindo	2.200.000
PT. Java Prima Consultindo	5.500.000
PT Celkomindo Indonesia	5.300.000
<b>Total</b>	<b>13.000.000</b>

*Beban yang*

*Masih Harus*

*Dibayar*

*Rp70.200.000*

**C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp70.200.000 dan Rp89.020.000, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA  
2016 dan TA 2015*

Uraian	TH 2016	TH 2015
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	13.200.000	25.300.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	34.200.000	33.000.000
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	22.800.000	30.720.000
<b>Jumlah</b>	<b>70.200.000</b>	<b>89.020.000</b>

*Ekuitas*

*Rp14.210.945.000*

**C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp14.210.945.000 dan Rp9.839.494.048. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

FNBP

Rp128.300.000

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp128.300.000 dan Rp125.000.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2016 dan 2015*

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	108.000.000	100.000.000	8
Pendapatan Lain-lain	20.300.000	25.000.000	(19)
Jumlah	128.300.000	125.000.000	3

Pendapatan Jasa berasal dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2015.

Beban Pegawai

Rp815.300.000

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp815.300.000 dan Rp800.000.000. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan 2015*

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	388.000.000	326.000.000	19
Beban Tunjangan-tunjangan	197.700.000	176.000.000	13
Beban Honorarium dan Vakasi	98.230.000	180.000.000	(45)
Beban Lembur	131.700.000	120.000.000	10
Jumlah	815.630.000	800.000.000	2

Beban

Persediaan

Rp451.000.000

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp451.000.000 dan Rp415.000.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk



mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015*

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	259.200.000	250.000.000	2
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	166.900.000	133.000.000	17
Beban Persediaan Lainnya	39.900.000	32.000.000	25
<b>Jumlah</b>	<b>466.000.000</b>	<b>415.000.000</b>	<b>9</b>

*Beban Barang dan Jasa  
Rp610.000.000*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp610.000.000 dan Rp655.000.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangkapy penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada bulan Maret 2016. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	867.000.000	148.000.000	41,42
Beban Langgatar Daya dan Jasa	65.000.000	85.000.000	123,53
Beban Jasa Pos dan Giro	31.000.000	32.000.000	13,13
Beban Jasa Konsultan	99.300.000	99.000.000	0,30
Beban Jasa Profesi	285.000.000	250.000.000	6,00
Beban Jasa Lainnya	13.000.000	10.000.000	30,00
Beban Aset Ekstrakom tabel Peabatar dan Mesin	12.000.000	9.000.000	33,33
Beban Aset Ekstrakom tabel Gedung dan Bangunan	30.000.000	15.000.000	100,00
Beban Aset Ekstrakom tabel Aset Tetap Lainnya	8.000.000	7.000.000	14,29
<b>Jumlah</b>	<b>610.000.000</b>	<b>655.000.000</b>	<b>16,87</b>

Beban Pemeliharaan  
Rp497.000.000

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp497.000.000 dan Rp513.177.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	270.000.000	270.000.000	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178.000.000	194.000.000	[7,94]
Beban Pemeliharaan Lainnya	49.000.000	49.177.000	[1,58]
Jumlah	497.000.000	513.177.000	[3,15]

Beban Perjalanan Dinas  
Rp790.000.000

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp790.000.000 dan Rp780.000.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	327.000.000	360.000.000	-6,57
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	250.000.000	246.000.000	2,04
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	125.000.000	107.000.000	16,82
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	88.000.000	78.000.000	12,82
Jumlah	790.000.000	780.000.000	1,28

Beban Barang untuk

#### D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun



*Diserahkan kepada Masyarakat Rp345.000.000* 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp345.000.000 dan Rp425.000.000. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	307.000.000	350.000.000	(12,29)
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	38.000.000	75.000.000	(49,33)
Jumlah	345.000.000	425.000.000	(18,82)

*Beban Bantuan Sosial Rp100.000.000*

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp100.000.000 dan Rp70.000.000. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	25.000.000	22.000.000	13,64
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	20.000.000	35.000.000	(42,86)
Beban Bantuan Sosial Untuk Pembedayaan Sosial	55.000.000	13.000.000	323,08
Jumlah	100.000.000	70.000.000	42,86

*Beban Penyusutan dan*

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun

Amortisasi 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp670.369.048 dan Rp522.191.548. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2016 dan 2015*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Perabotan dan Mesin	428.119.048	375.400.000	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	149.000.000	99.541.000	-
Beban Penyusutan Jalan, Pipa, Jaringan	15.750.000	8.750.000	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	22.500.000	18.500.000	-
Jumlah Penyusutan	615.369.048	502.191.000	-
Beban Amortisasi Software	46.000.000	-	-
Beban Penyusutan aset tak-bis	9.000.000	20.000.548	-
Jumlah Amortisasi	55.000.000	20.000.548	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	670.369.048	522.191.548	-

Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih  
Rp1.505.000

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.505.000 dan Rp1.300.500. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	1.420.000	1.200.000	18,33
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	85.000	100.500	(15,42)
Jumlah	1.505.000	1.300.500	15,72



Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp8.000.000

### D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Pejslaba AbtArgktDast	12.000.000	8.000.000	50,00
Pejslaba AbtKasbr	(5.500.000)	(5.000.000)	10,00
Selblh Kirs	(2.500.000)	(4.500.000)	(44,44)
Pe idapats Peaveslaba Nlbi Persedbaan*)	4.000.000	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	8.000.000	(1.500.000)	(63,33)

\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa  
Rp77.675.000

### D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2016 dan 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP	7.325.000	6.500.000	12,69
Beban Perjalanan Dinas	(30.000.000)	(17.500.000)	71,43
Beban Persediaan	(55.000.000)	(68.000.000)	(19,12)
Jumlah	(77.675.000)	(79.000.000)	(1,68)

Pendapatan PNBP di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena bencana longsor bukit di Jayapura. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### *Ekuitas Awal*

*Rp9.839.494.048*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp9.839.494.048 dan Rp7.895.650.450.

### *Defisit LO*

*Rp4.221.549.048*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp4.221.549.048 dan Rp4.058.169.548. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/ defisit kegiatan operasional, surplus/ defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### *Penyesuaian*

#### *Nilai Aset*

*Rp0*

### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp42.500.000. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

### *Koreksi Nilai*

#### *Persediaan*

*Rp277.885.000*

### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp277.885.000 dan Rp215.850.000. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

<b>Jenis Persediaan</b>	<b>Koreksi</b>
Barang Konsumsi	200.000.000
Suku Cadang	77.885.000
<b>Jumlah</b>	<b>277.885.000</b>

### *Selisih*

#### *Revaluasi Aset*

*Tetap*

### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

*Rp125.000.000* Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp125.000.000 dan Rp125.000.000. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi sebidang tanah milik satker di Jl. Merdeka No. 213 Jayapura.

**Koreksi Aset**

**Tetap Non**

**Revaluasi**

*Rp30.000.000*

**E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp30.000.000 dan Rp47.500.000. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	27.785.000
Gedung dan Bangunan	(67.785.000)
<b>Jumlah</b>	<b>(30.000.000)</b>

**Koreksi Lain-**

**Lain**

*Rp55.000.000*

**E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp55.000.000 dan Rp16.500.000. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	42.500.000
Koreksi Pendapatan	31.100.000
Koreksi Piutang	21.400.000
Koreksi Kewajiban	15.000.000
Koreksi Hibah	5.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>115.000.000</b>

**Transaksi Antar**

**Entitas**

*Rp8.355.115.000*

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp8.355.115.000 dan Rp5.804.663.146. Transaksi antar



Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	335.000.000
Ditagikan ke Entitas Lain	(8.690.115.000)
Transfer Masuk	(170.000.000)
Transfer Keluar	50.000.000
Pengesahan Hibah Langsung	120.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>(8.355.115.000)</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp335.000.000 sedangkan DKEL sebesar Rp8.690.115.000

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp170.000.000 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Kantor Akuntansi Denpasar	33.000.000
3	Persediaan	Deputi Akuntansi	137.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>170.000.000</b>

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp50.000.000 yang merupakan transfer Persediaan kepada Deputi Sistem dan Peraturan Akuntansi.

**E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang



maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp120.000.000-. dari total Rp365.000.000,- yang diterima sepanjang tahun 2016.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	Rp 70.000.000
2	PT Semua Bahagia	Barang	Rp 50.000.000
Total Pengesahan			Rp 120.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp 120.000.000

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran.

*Ekuitas Akhir*

**E.5 Ekuitas Akhir**

*Rp14.210.945.000*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp14.210.945.000 dan Rp9.839.494.048

u



## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 15 Januari 2016 telah terjadi bencana alam berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Jaringan komputer, instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut Kepala Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura telah membentuk tim untuk melakukan identifikasi terkait kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut dan menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk tetap memberikan pelayanan kepada *stakeholder* sebagaimana mestinya.

### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 009/BALAP.5/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 018/BALAP.5/2016 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura pada tanggal 05 Juli 2016 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Denny FS
Pejabat Pembuat Komitmen	: Fitra
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Fajar
Bendahara	: Yessy

**Menjadi:**

<b>Kuasa Pengguna Anggaran</b>	<b>: Mutiara</b>
<b>Pejabat Pembuat Komitmen</b>	<b>: Syahrul Fattah</b>
<b>Pejabat Penandatangan/Penguji SPM</b>	<b>: Rizki</b>
<b>Bendahara</b>	<b>: Sutanti</b>



Lampiran I: Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

**Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura**  
**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,**  
**Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016**

Aset Tetap	Nilai	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
	Miliar		Per 31-12-2015	Tahun 2016	Per 31-12-2016	Per 31-12-2016
Tanah						
Tanah	-	5.950.000.000	-	-	-	5.950.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>5.950.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.950.000.000</b>
Peralatan dan Mesin						
Alat Angkutan Darat Bermotor	7	240.000.000	190.714.286	34.285.714	225.000.000	15.000.000
Alat Kantor	5	900.000.000	90.000.000	190.000.000	270.000.000	630.000.000
Alat Rantai Tangan	5	500.000.000	50.000.000	100.000.000	150.000.000	350.000.000
Alat Komunikasi	5	115.000.000		23.000.000	23.000.000	92.000.000
Komputer Unit	4	100.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000
Peralatan Komputer	4	250.000.000	62.500.000	62.500.000	125.000.000	125.000.000
Peralatan Alat Raga	3	10.000.000	6.666.667	3.333.333	10.000.000	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.115.000.000</b>	<b>424.830.952</b>	<b>428.119.648</b>	<b>653.000.000</b>	<b>1.262.000.000</b>
Gedung dan Bangunan						
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	5.450.000.000	1.362.500.000	109.000.000	1.471.500.000	3.978.500.000
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2.000.000.000	442.250.000	40.000.000	482.250.000	1.517.750.000
<b>Jumlah</b>		<b>7.450.000.000</b>	<b>1.804.750.000</b>	<b>149.000.000</b>	<b>1.953.750.000</b>	<b>5.496.250.000</b>
Jaringan						
Jaringan Listrik	40	50.000.000	17.500.000	1.250.000	18.750.000	31.250.000
Jaringan Telepon	20	290.000.000	58.000.000	14.500.000	72.500.000	217.500.000
<b>Jumlah</b>		<b>340.000.000</b>	<b>75.500.000</b>	<b>15.750.000</b>	<b>91.250.000</b>	<b>248.750.000</b>
Konstruksi Dalam Pengerjaan						
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	375.000.000	-	-	-	375.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>375.000.000</b>				<b>375.000.000</b>
Aset Tetap Lainnya						
Barang bekas keserius	4	90.000.000	19.500.000	22.500.000	42.000.000	48.000.000
	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>90.000.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>48.000.000</b>
<b>Total</b>		<b>16.320.000.000</b>	<b>2.324.630.952</b>	<b>615.369.648</b>	<b>2.940.000.000</b>	<b>13.380.000.000</b>

\* Beban Amortisasi

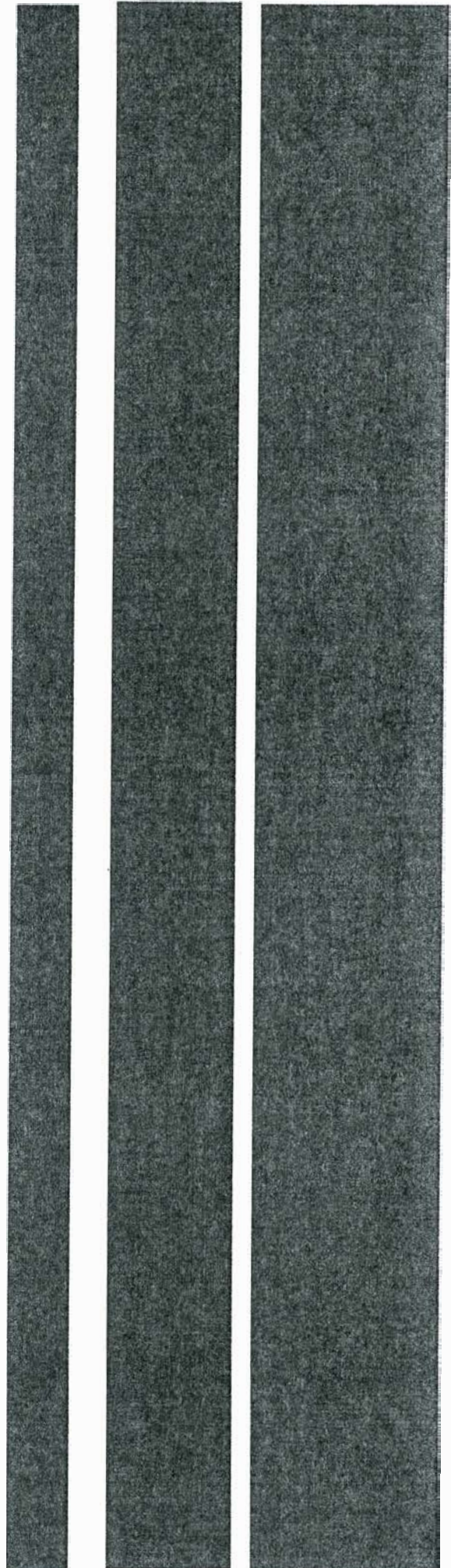
Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA JAYAPURA  
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA  
PER 31 DESEMBER 2016

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	PT Sem ra Balagis	Uang	DN	Rp 150.000.000		Rp 150.000.000	Proses Pengesahan
		Barang	DN	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000		
2	WHD	Uang	LN	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000		
3	PemdaMaju Terus	Barang	DN	Rp 95.000.000		Rp 95.000.000	Belum dregister
Jumlah				Rp 365.000.000	Rp 120.000.000	Rp 245.000.000	

B. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPA-W

**Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa  
Provinsi Papua**  
Untuk Periode yang Berakhir  
31 Desember 2016



Gedung Menara Tinggi,  
Jl Permai No. 10  
Jayapura, Papua 90000



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Papua, Januari 2017  
Kepala,

Utami, MSc  
NIP 1971 0901 199203 2 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
G. Penjelasan Umum	x
H. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
I. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
J. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
K. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
L. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

**KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA  
GEDUNG MENARA TINGGI, JL PERMAI NO. 10, JAYAPURA, PAPUA  
TELEPON 0967 5563265, 5335234, FAXIMILE 096733081972**

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Papua, Januari  
2017  
Kepala,

Utami, MSc  
NIP 1971 0901 199203 2  
002

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp720.000.000 atau mencapai 96 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp750.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp30.590.000.000 atau mencapai 98.36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp31.100.000.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp32.308.685.000 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.653.485.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp248.450.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp28.782.750.000; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp624.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp437.160.000 dan Rp31.871.525.000.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp912.530.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp19.670.030.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional



senilai Rp18.757.500.000. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp16.000.000 dan Rp155.000.000 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp18.896.500.000

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp19.778.025.000 ditambah Defisit-LO sebesar Rp18.896.500.000 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.110.000.000 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp29.880.000.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp31.871.525.000.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2016		% thd Angg	TA 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	750.000.000	720.000.000	96,00	650.000.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>750.000.000</b>	<b>720.000.000</b>	<b>96,00</b>	<b>650.000.000</b>
<b>BELANJA</b>	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	7.000.000.000	6.900.000.000	98,57	6.400.000.000
Belanja Barang	B.4	12.800.000.000	12.700.000.000	99,22	10.990.000.000
Belanja Modal	B.5	11.100.000.000	10.790.000.000	97,21	6.220.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	200.000.000	200.000.000	100,00	140.000.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>31.100.000.000</b>	<b>30.590.000.000</b>	<b>98,36</b>	<b>23.750.000.000</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



**II. NERACA**

**KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	20.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	6.000.000	2.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	80.000.000	18.000.000
Plutang Bukan Pajak	C.4	120.000.000	110.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	72.000.000	48.000.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	24.000.000	19.200.000
Penyisihan Plutang Tak Tertagih - Plutang Lancar	C.7	(11.055.000)	(6.555.000)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	454.540.000	400.000.000
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	135.000.000	153.850.000
Persewaan	C.10	1.753.000.000	1.200.000.000
Jumlah Aset Lancar		2.653.485.000	1.944.495.000
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	164.000.000	90.000.000
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	92.000.000	50.400.000
Penyisihan Plutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	(7.550.000)	(7.020.000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		248.450.000	133.380.000
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	12.100.000.000	6.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.15	4.150.000.000	2.100.000.000
Gedung dan Bangunan	C.16	16.500.000.000	14.000.000.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	680.000.000	100.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	210.000.000	180.000.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	750.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(5.607.250.000)	(4.501.000.000)
Jumlah Aset Tetap		28.782.750.000	17.879.000.000
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	400.000.000	40.000.000
Aset Lain-Lain	C.22	390.000.000	220.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(166.000.000)	(67.000.000)
Jumlah Aset Lainnya		624.000.000	193.000.000
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>32.308.685.000</b>	<b>20.149.875.000</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	20.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	134.080.000	18.000.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	164.200.000	165.400.000
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	118.880.000	188.450.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		437.160.000	371.850.000
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>437.160.000</b>	<b>371.850.000</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	31.871.525.000	19.778.025.000
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>31.871.525.000</b>	<b>19.778.025.000</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>32.308.685.000</b>	<b>20.149.875.000</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2016	2015
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	912.530.000	445.000.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>912.530.000</b>	<b>445.000.000</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	6.940.000.000	5.665.000.000
Beban Persediaan	D.3	3.487.000.000	3.152.000.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.924.000.000	1.542.100.000
Beban Pemeliharaan	D.5	1.755.000.000	1.618.000.000
Beban Perjalanan	D.6	2.834.000.000	2.781.000.000
Beban Barang untuk Di serahkan kepada Masyarakat	D.7	1.350.000.000	1.025.000.000
Beban Bantuan Sosial	D.8	200.000.000	140.000.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.175.000.000	736.400.000
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	5.030.000	4.010.000
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>19.670.030.000</b>	<b>16.663.510.000</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(18.757.500.000)</b>	<b>(16.218.510.000)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Non lancar	D.11	28.500.000	18.000.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(5.500.000)	(5.000.000)
Defisit Selisih Kurs		(4.000.000)	(4.500.000)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.000.000	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(8.000.000)	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>16.000.000</b>	<b>8.500.000</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(18.741.500.000)</b>	<b>(16.210.010.000)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNB	D.12	15.000.000	13.500.000
Beban Perjalanan Dinas		(60.000.000)	(32.000.000)
Beban Persediaan		(110.000.000)	(75.000.000)
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(18.896.500.000)</b>	<b>(16.210.010.000)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2016	2015
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	19.778.025.000	11.139.285.000
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(18.896.500.000)	(16.210.010.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	250.000.000
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	577.885.000	458.750.000
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	450.000.000	124.000.000
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(35.000.000)	82.000.000
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	117.115.000	184.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1.110.000.000</b>	<b>1.098.750.000</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	29.880.000.000	23.750.000.000
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>31.871.525.000</b>	<b>19.778.025.000</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah

##### Akuntansi Istimewa Provinsi Papua

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Papua. Melalui peran Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua berkomitmen dengan visi:

***"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual."***

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang

dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.

3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

#### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua Tahun 2016 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua adalah 5 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

*Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W*

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	2500	Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi	-	1	-	-	1





2	2500	Kantor Akuntansi Istimewa	-	1	-	-	1
3	2500	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	-	1	-	-	1
4	2500	Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	-	1	-	-	1
5	2500	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	-	1	-	-	1
6	2500	Kantor Akuntansi Istimewa Manokwari	-	1	-	-	1

*Basis Akuntansi*

### A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah

dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

*Pendapatan-  
LO*

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

(4) **Beban**

- **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- **Beban** diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- **Beban** disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

*Aset*

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

a. **Aset Lancar**

- **Aset Lancar** mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- **Kas** disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- **Piutang** dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat



keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil

perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

##### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak



terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2016	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	700.000.000	700.000.000
Pendapatan Lain-lain	50.000.000	50.000.000
Jumlah Pendapatan	750.000.000	750.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.500.000.000	7.000.000.000
Belanja Barang	15.000.000.000	12.800.000.000
Belanja Modal	9.000.000.000	11.100.000.000
Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	200.000.000
Jumlah Belanja	80.700.000.000	81.100.000.000

*Realisasi*

*Pendapatan*

*Rp720.000.000*

### B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp720.000.000 atau mencapai 96 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp750.000.000. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua berasal dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan Jasa berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan pelatihan akuntansi kepada masyarakat.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:



*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2016*

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	700.000.000	620.000.000	88,57
Pendapatan Lain-lain	50.000.000	100.000.000	200,00
Jumlah	750.000.000	720.000.000	96,00

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 10.77% dibandingkan realisasi TA 2015. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan jasa akuntansi sehubungan dengan kewajiban penerapan akuntansi berbasis akrual di tahun 2016. Selain itu terdapat kenaikan Pendapatan Lain-lain dari Rp63.000.000 menjadi Rp100.000.000 atau sebesar 58.73% dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu. Hal ini berasal dari pendapatan jasa lembaga keuangan dan pengembalian belanja pegawai serta belanja lainnya.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	620.000.000	587.000.000	5,82
Pendapatan Lain-lain	100.000.000	63.000.000	58,73
Jumlah	720.000.000	650.000.000	10,77

*Realisasi*

*Belanja Negara Rp30.590.000.000*

**B.2. BELANJA**

Realisasi Belanja pada TA 2016 adalah sebesar Rp30.590.000.000 atau 98.36% dari anggaran belanja sebesar Rp31.100.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 tersaji sebagai berikut:

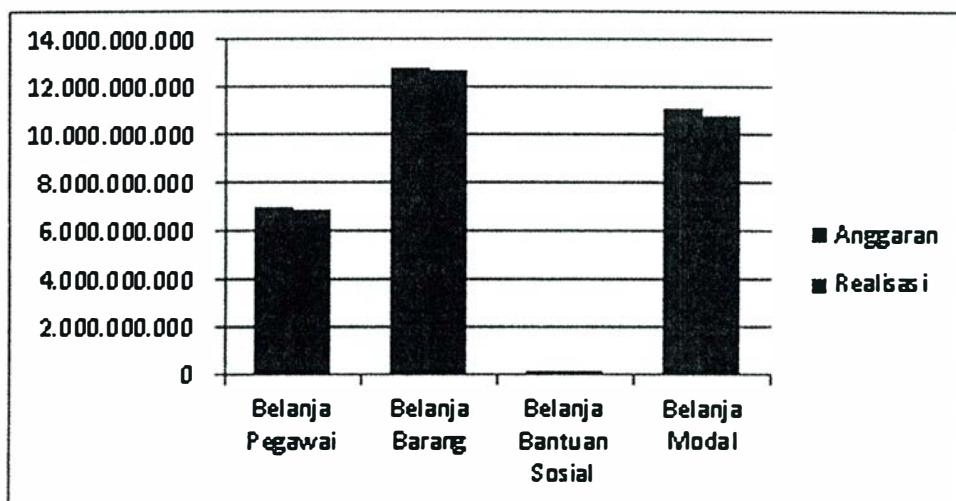
*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016*

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7.000.000.000	6.950.000.000	99,29
Belanja Barang	12.900.000.000	12.700.000.000	98,22
Belanja Modal	11.100.000.000	10.790.000.000	97,21
Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	200.000.000	100,00
Total Belanja Kotor	31.100.000.000	30.640.000.000	98,52
Pengembalian Belanja	-	(50.000.000)	
Total Belanja	31.100.000.000	30.590.000.000	98,36

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat



dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 21.78% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2016,
2. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja bantuan sosial untuk penduduk daerah terpencil dan perbatasan negara yang mempunyai kerawanan sosial.

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI TA. 2016	REALISASI TA. 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6.900.000.000	6.400.000.000	7,81
Belanja Barang	12.700.000.000	10.990.000.000	15,56
Belanja Modal	10.790.000.000	6.220.000.000	73,47
Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	140.000.000	42,86
Jumlah	30.590.000.000	23.750.000.000	28,20

*Belanja Pegawai* **B.3 Belanja Pegawai**

*Rp6.900.000.000* Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp6.900.000.000 dan Rp6.400.000.000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 7.81 persen dari realisasi belanja TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi PNS.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN)%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.931.000.000	4.800.000.000	2,73
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	997.000.000	700.000.000	42,43
Belanja Honorarium	668.300.000	550.000.000	1,51
Belanja Lembur	299.000.000	250.000.000	19,60
Belanja Vakansi	164.700.000	130.000.000	26,69
Jumlah Belanja Kotor	6.959.000.000	6.430.000.000	8,09
Pengembalian Belanja Pegawai	(60.000.000)	(30.000.000)	66,67
Jumlah Belanja	6.899.000.000	6.400.000.000	7,81

Belanja Barang  
Rp12.700.000.000

#### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp12.700.000.000 dan Rp10.990.000.000. Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan 2,83% dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh biaya perjalanan dinas peserta diklat serta pengadaan perlengkapan untuk kegiatan peserta sepanjang tahun 2016.

#### Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3.937.000.000	4.070.000.000	(6,27)
Belanja Barang Non Operasional	1.000.000.000	770.000.000	29,87
Belanja Jasa	1.824.000.000	1.280.000.000	42,50
Belanja Pemeliharaan	1.755.000.000	1.356.000.000	29,42
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.834.000.000	2.044.000.000	38,65
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	1.350.000.000	1.470.000.000	(8,16)
Jumlah Belanja Kotor	12.700.000.000	10.990.000.000	15,56
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	12.700.000.000	10.990.000.000	15,56

Belanja Modal  
Rp10.790.000.000

#### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp10.790.000.000 dan Rp6.220.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 73,47% dibandingkan TA 2015 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi, berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.



*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI TA. 2016	REALISASI TA. 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	5.900.000.000	3.000.000.000	96,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.200.000.000	1.500.000.000	46,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.750.000.000	1.050.000.000	66,67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	580.000.000	400.000.000	45,00
Belanja Modal Lainnya	360.000.000	270.000.000	33,33
Jumlah Belanja Kotor	10.790.000.000	6.220.000.000	73,47
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>10.790.000.000</b>	<b>6.220.000.000</b>	<b>73,47</b>

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.900.000.000 dan Rp3.000.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 96.67 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	4.800.000.000	2.200.000.000	109,09
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	480.000.000	220.000.000	109,09
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	180.000.000	120.000.000	
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	480.000.000	300.000.000	60,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	180.000.000	160.000.000	12,50
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>96,67</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>96,67</b>

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah sebesar Rp2.200.000.000, mengalami kenaikan sebesar 46.67 persen bila dibandingkan dengan TA 2015



yaitu sebesar Rp1.500.000.000. Hal ini disebabkan oleh penambahan gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung. Adapun penambahan tersebut dalam rangka persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2015.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI T.A 2016	REALISASI T.A 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	700.000.000	650.000.000	32,08
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	800.000.000	600.000.000	60,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	100.000.000	70.000.000	42,88
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	600.000.000	400.000.000	60,00
Jumlah Belanja Kotor	2.200.000.000	1.300.000.000	46,67
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>46,67</b>

**B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.750.000.000 dan Rp1.050.000.000. Realisasi belanja gedung dan bangunan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 66,67 persen yang berasal dari penambahan ruang kelas baru dan gedung baru yang dikhususkan untuk pelatihan. Gedung ini berlokasi di Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura, Merauke, dan Manokwari.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2016	REALISASI T.A 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.500.000.000	950.000.000	36,61
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	250.000.000	100.000.000	60,00
Jumlah Belanja Kotor	1.750.000.000	1.050.000.000	66,61
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>66,61</b>

**B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp580.000.000 dan Rp400.000.000. Realisasi TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 45 persen dibandingkan

realisasi tahun anggaran lalu. Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi di semua satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Jayapura dalam rangka mendukung rencana strategis.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	520.000.000	360.000.000	44,44
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	60.000.000	40.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	580.000.000	400.000.000	45,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	580.000.000	400.000.000	45,00

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp360.000.000 dan Rp270.000.000. Realisasi TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 33,33 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan pengadaan *software* pendapatan untuk implementasi akuntansi berbasis akrual di seluruh satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Jayapura.

Belanja  
Bantuan Sosial  
Rp200.000.000

**B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan Rp140.000.000. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 42,86% dibandingkan TA 2015. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

18

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Kartu AKBANSI Bismewa Jayapura	100.000.000	70.000.000	42,86
Penerima Bantuan melalui Kartu AKBANSI Bismewa B. Iak	40.000.000	30.000.000	33,33
Penerima Bantuan melalui Kartu AKBANSI Bismewa Merauke	60.000.000	40.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	200.000.000	140.000.000	42,86
Pengembalian	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>200.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>42,86</b>



**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Kas di Bendahara Pengeluaran Rp20.000.000*

**C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp20.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

Keterangan	TH 2016	TH 2015
Uang tunai	6.000.000	-
Rekening Bank	14.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>20.000.000</b>	<b>-</b>

*Kas di Bendahara Penerimaan Rp6.000.000*

**C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp6.000.000 dan Rp2.000.000. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2016 dan 2015*

Keterangan	TH 2016	TH 2015
Uang Tunai	1.500.000	864.000
Rekening Bank	4.500.000	1.136.000
<b>Jumlah</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

*Kas Lainnya dan Setara Kas Rp80.000.000*

**C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp80.000.000. dan Rp18.000.000.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi



jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015*

Keterangan	TH 2016	TH 2015
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	14.000.000	4.000.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	25.000.000	5.500.000
Kas Lainnya dari Hibah	41.000.000	8.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>80.000.000</b>	<b>18.000.000</b>

*Piutang PNB*  
*Rp120.000.000*

**C.4 Piutang PNB**

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp120.000.000, dan Rp110.000.000. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNB TA 2016 dan 2015*

Uraian	TH 2016	TH 2015
Piutang PNB	105.000.000	100.000.000
Piutang Lainnya	15.000.000	10.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>120.000.000</b>	<b>110.000.000</b>

*Bagian Lancar TP/TGR*  
*Rp72.000.000*

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp72.000.000 dan Rp48.000.000. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015*

No	Debitur per Satker	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Satker Kanwil Papua	11.000.000	-
2	Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura	36.000.000	24.000.000
3	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	8.000.000	13.500.000
4	Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	12.500.000	8.000.000
5	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	4.500.000	-
6	Kantor Akuntansi Istimewa Manokwari	0	2.500.000
<b>Jumlah</b>		<b>72.000.000</b>	<b>48.000.000</b>

Bagian Lancar  
TPA  
Rp24.000.000

**C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**  
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp24.000.000 dan Rp19.200.000. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA TA 2016 dan 2015*

No	Debitur per Satker	TH 2016	TH 2015
1	Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura	12.000.000	9.600.000
2	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	5.700.000	-
3	Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	3.800.000	3.800.000
4	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	2.500.000	4.500.000
5	Kantor Akuntansi Istimewa Manokwari	-	1.300.000
<b>Jumlah</b>		<b>24.000.000</b>	<b>19.200.000</b>

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih -  
Piutang Lancar  
Rp11.055.000

**C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar**  
Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp11.055.000 dan Rp6.555.000. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar  
TA 2016

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	90.000.000	0,30%	270.000
Kurang Lancar	70.000.000	10%	7.000.000
Diragukan	-	30%	-
Miscet	-	100%	-
Jumlah	120.000.000		7.270.000
<b>Bagian Lancar T P/T GR</b>			
Lancar	45.000.000	0,30%	135.000
Kurang Lancar	27.000.000	10%	2.700.000
Diragukan	-	30%	-
Miscet	-	100%	-
Jumlah	72.000.000		2.835.000
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	16.000.000	0,30%	48.000
Kurang Lancar	8.000.000	10%	800.000
Diragukan	-	30%	-
Miscet	-	100%	-
Jumlah	24.000.000		848.000
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>216.000.000</b>		<b>11.068.000</b>

**Belanja Dibayar di Muka C.8 Beban Dibayar di Muka**

di Muka

Rp454.540.000

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp454.540.000 dan Rp400.000.000. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2016 dan 2015

Jenis	TH 2016	TH 2015
Pembayaran Internet	80.000.000	160.000.000
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	185.000.000	140.000.000
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	189.540.000	100.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>454.540.000</b>	<b>400.000.000</b>

**Pendapatan**

yang Masih

Harus Diterima

Rp135.000.000

**C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp135.000.000. dan Rp153.850.000, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun



belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2016 dan 2015*

Jenis	TH 2016	TH 2015
Pendapatan Jasa Penilaian	114.740.000	82.810.000
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	20.260.000	71.040.000
Jumlah	135.000.000	153.850.000

*Persediaan*

*Rp.1.753.000.000*

**C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp1.753.000.000 dan Rp1.200.000.000.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/ atau untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015*

Persediaan	TH 2016	TH 2015
Barang Konsumsi	385.700.000	550.000.000
Barang untuk Pemeliharaan	301.600.000	275.000.000
Suku Cadang	424.000.000	180.000.000
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	185.400.000	25.000.000
Persediaan Lainnya	456.300.000	170.000.000
Jumlah	1.753.000.000	1.200.000.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp1.100.000 berada dalam dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

*Tagihan*

*TP/TGR*

*Rp164.000.000*

**C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp164.000.000. dan Rp90.000.000. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada



bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR ) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) TA 2016 dan 2015*

No	Debitur per Satker	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Satker Kanwil Papua	22.500.000	-
2	Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura	54.000.000	45.000.000
3	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	36.870.000	12.000.000
4	Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	48.660.000	6.470.000
5	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	1.970.000	-
6	Kantor Akuntansi Istimewa Manokwari	0	26.530.000
<b>Jumlah</b>		<b>164.000.000</b>	<b>90.000.000</b>

Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp92.000.000

**C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp92.000.000 dan Rp50.400.000. Rincian TPA untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

No	Debitur	TH 2016	TH 2015
1	Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura	18.000.000	25.200.000
2	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	21.200.000	-
3	Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	34.450.000	9.600.000
4	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	12.350.000	10.800.000
5	Kantor Akuntansi Istimewa Manokwari	6.000.000	4.800.000
<b>Jumlah</b>		<b>92.000.000</b>	<b>50.400.000</b>

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih -  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp7.550.000

**C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp7.550.000 dan Rp7.020.000. Penyisihan Piutang tak tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2016*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan T P/T GR</b>			
Lancar	120.000.000	0,50%	600.000
Kurang Lancar	44.000.000	10%	4.400.000
Dragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	164.000.000		5.000.000
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	70.000.000	0,50%	350.000
Kurang Lancar	22.000.000	10%	2.200.000
Dragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	92.000.000		2.550.000
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>256.000.000</b>		<b>7.680.000</b>

*Tanah*

**C.14 Tanah**

*Rp12.100.000.000*

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Akuntansi Istimewa Provinsi Papua per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp12.100.000.000 dan Rp6.000.000.000.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	Rp	6.000.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	6.350.000.000
Hibah	Rp	200.000.000
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:		
Revaluasi aset	Rp	(450.000.000)
Penghapusan	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp</b>	<b>12.100.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp</b>	<b>12.100.000.000</b>

Revaluasi atas tanah dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2015. Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di Jl.Matoa No. 17, Jayapura pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura, pada tanggal pelaporan dikuasai/ digunakan oleh pihak ketiga.

Peralatan dan  
Mesin  
Rp4.150.000.000

### C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.150.000.000 dan Rp2.100.000.000. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	Rp	2.100.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	1.750.000.000
Hibah	Rp	372.215.000
Transfer Masuk	Rp	175.000.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	50.000.000
Koreksi tambah	Rp	44.000.000
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(32.500.000)
Penghapusan	Rp	(308.715.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp</b>	<b>4.150.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	Rp	(1.317.900.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp</b>	<b>2.832.100.000</b>

#### Mutasi tambah:

- Pembelian komputer unit senilai Rp200.000.000.
- Pengadaan alat angkutan darat bermotor senilai Rp1.550.000.000.
- Hibah sebesar Rp372.215.000 merupakan hibah alat kantor dan rumah tangga yang pencatatannya berdasarkan nilai pada berita acara serah terima (BAST).
- Transfer masuk berupa komputer unit dan peralatan komputer dari Kantor Pusat BAPK sebesar Rp175.000.000.
- Reklasifikasi masuk berasal dari pengaktifan kembali alat angkutan darat bermotor yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp50.000.000.
- Koreksi tambah berasal dari koreksi atas saldo awal dengan total Rp44.000.000.

#### Mutasi kurang:

- Penghentian alat studio, komunikasi, dan pemancar dari penggunaannya sebesar Rp32.500.000 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain.
- Penghapusan sebesar Rp308.715.000 berupa alat



angkutan darat bermotor.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp16.500.000.000*

#### C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp16.500.000.000 dan Rp14.000.000.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>14.000.000.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	2.562.785.000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	(62.785.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>16.500.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(4.021.100.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>12.478.900.000</b>

Mutasi tambah:

- Pembangunan gedung baru serta penambahan ruang kelas senilai Rp2.562.785.000.
- Koreksi kurang sebesar Rp62.785.000 yang merupakan koreksi pencatatan dari tahun anggaran yang lalu.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi  
dan Jaringan  
Rp680.000.000*

#### C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp680.000.000 dan Rp100.000.000. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>100.000.000</b>
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	580.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>680.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(182.250.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>497.750.000</b>



Transaksi penambahan berupa penambahan jaringan teknologi informasi di seluruh wilayah Papua dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap*

*Lainnya*

*Rp210.000.000*

**C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp210.000.000 dan Rp180.000.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>180.000.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	30.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>210.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(86.000.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>124.000.000</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi*

*dalam*

*Pengerjaan*

*Rp750.000.000*

**C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp750.000.000 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura dan Biak yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan*

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1	02/KPA.KAV 2015	500.000.000	75	375.000.000	KAI PA PUA
2	10/KPA.KAV 2015	500.000.000	75	375.000.000	KAI BIAK
	<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000.000</b>		<b>750.000.000</b>	

Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp5.607.250.000

**C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp5.607.250.000 dan Rp4.501.000.000. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 4.150.000.000	Rp 1.317.900.000	Rp 2.832.100.000
2	Gedung dan Bangunan	Rp 16.500.000.000	Rp 4.021.100.000	Rp 12.478.900.000
3	Jalan, ligasi dan Jaringan	Rp 680.000.000	Rp 182.250.000	Rp 497.750.000
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 210.000.000	Rp 86.000.000	Rp 124.000.000
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>Rp 21.540.000.000</b>	<b>Rp 5.607.250.000</b>	<b>Rp 15.932.750.000</b>

Aset Tak  
Berwujud  
Rp400.000.000

**C.21 Aset Tak Berwujud**

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp400.000.000 dan Rp40.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud*

Uraian	Nilai
Software Komputer	240.000.000
ATB Lainnya	160.000.000
	<b>400.000.000</b>

**Mutasi:**

Saldo per 31 Desember 2015	Rp	40.000.000
Mutasi tambah:		
pembelian	Rp	360.000.000
Saldo per 31 Desember 2016	Rp	400.000.000
Amortisasi	Rp	(81.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	Rp	<b>319.000.000</b>

le

Mutasi tambah:

- Pembelian berupa aplikasi penatausahaan PNBPN senilai Rp200.000.000
- Penambahan fitur pada MOYB Accounting Profesional senilai Rp160.000.000.

Aset Lain-Lain  
Rp390.000.000

### C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp390.000.000 dan Rp220.000.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Akuntansi Istimewa Provinsi Papua serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	Rp	220.000.000
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	250.000.000
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	(50.000.000)
- penghapusan BMN	Rp	(30.000.000)
Saldo per 31 Desember 2016	Rp	390.000.000
Akumulasi Penyusutan	Rp	(85.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	Rp	305.000.000

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi dari aset tetap berupa penghentian penggunaan alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp250.000.000 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain.
- b. Pengurangan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali alat angkutan yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp50.000.000.
- c. Pengurangan berupa penghapusan sebesar Rp30.000.000. merupakan penghapusan kendaraan bermotor melalui penjualan.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.



*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*  
Rp166.000.000

**C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp166.000.000 dan Rp67.000.000. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	400.000.000	81.000.000	319.000.000
Sotruae	240.000.000	54.000.000	186.000.000
ATB lainnya	160.000.000	27.000.000	133.000.000
Aset Lain-lain	390.000.000	85.000.000	305.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>790.000.000</b>	<b>166.000.000</b>	<b>624.000.000</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari KPPN*  
Rp20.000.000.

**C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp20.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Kantor Akuntansi Istimewa adalah sebagai berikut:

*Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN*

No	Uraian	Tahun 2015
1	Kantor Akuntansi Istimewa Papua	10.000.000
2	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	3.000.000
3	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	7.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>20.000.000</b>

*Utang kepada Pihak Ketiga*  
Rp134.080.000

**C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp134.080.000 dan Rp18.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan



belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kanwil Akuntansi Istimewa Provinsi Papua per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga*

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp 72.280.000
2	Potong Pajak yang belum disetor	Rp 15.000.000
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp 46.800.000
<b>Total</b>		<b>Rp 134.080.000</b>

*Pendapatan  
Diterima di  
Muka  
Rp164.200.000*

**C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp164.200.000 dan Rp165.400.000. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNPB. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

*Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	65.500.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Instansi Pemerintah Lainnya	24.900.000	Penyusunan Neraca Awal
Badan Lainnya	73.800.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
<b>Total</b>	<b>164.200.000</b>	

*Beban yang  
Masih harus  
Dibayar  
Rp118.880.000*

**C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp118.880.000 dan Rp188.450.000, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA  
2016 dan TA 2015*

Keterangan	TH 2016	TH 2015
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	21.745.000	70.010.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	55.755.000	54.090.000
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	41.380.000	64.350.000
Jumlah	118.880.000	188.450.000

*Ekuitas*

*Rp31.871.525.000*

**C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp31.871.525.000 dan Rp19.778.025.000. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

*Pendapatan*

*PNBP*

*Rp912.530.000*

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp912.530.000 dan Rp445.000.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2016 dan 2015*

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	896.000.000	200.000.000	198,00
Pendapatan Lain-lain	16.530.000	245.000.000	29,20
Jumlah	912.530.000	445.000.000	105,06

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-lain-LO merupakan pengembalian beban pegawai, beban jasa, dan perjalanan dinas yang berasal dari transaksi tahun 2015.

*Beban Pegawai*

*Rp6.940.000.000*

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp6.940.000.000 dan Rp5.665.000.000. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	3.618.700.000	3.000.000.000	21
Beban Perjalanan-Perjalanan	2.271.300.000	1.800.000.000	26
Beban Honorarium dan Vakansi	760.000.000	665.000.000	13
Beban Lembur	300.000.000	200.000.000	50
Jumlah	6.940.000.000	5.665.000.000	23

*Beban*

*Persediaan*

*Rp3.487.000.000*

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.487.000.000 dan



Rp3.152.000.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.875.000.000	1.650.000.000	13,64
Beban Persediaan Untuk Titik Strategis/Bejaga-jaga	1.212.500.000	1.150.000.000	5,43
Beban Persediaan Lainnya	399.500.000	352.000.000	13,49
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>3.487.000.000</b>	<b>3.152.000.000</b>	<b>10,63</b>

*Beban Barang dan Jasa*  
Rp1.924.000.000

#### D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.924.000.000 dan Rp1.542.100.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	407.580.000	350.000.000	16,57
Beban Barang Non Operasional	115.420.000	100.000.000	15,42
Beban Langganan Daya dan Jasa	335.700.000	300.000.000	11,90
Beban Jasa Pos dan Giro	161.800.000	150.000.000	7,73
Beban Jasa Konsultan	280.000.000	200.000.000	25,00
Beban Jasa Protesis	486.200.000	300.000.000	66,40
Beban Jasa Lainnya	54.100.000	52.000.000	4,04
Beban Aset Eks Istikom label Peralatan dan Mesin	60.000.000	66.000.000	9,09
Beban Aset Eks Istikom label Gedung dan Bangunan	30.000.000	28.000.000	7,14
Beban Aset Eks Istikom label Aset Tetap Lainnya	10.000.000	7.100.000	40,85
<b>Jumlah</b>	<b>1.924.000.000</b>	<b>1.542.100.000</b>	<b>24,76</b>

*Beban Pemeliharaan*  
Rp1.755.000.000

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.755.000.000 dan Rp1.618.000.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban



pemeliharaan untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	Th 2015	NNK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	989.300.000	980.000.000	2,03
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	888.900.000	560.000.000	-0,20
Beban Pemeliharaan Lainnya	226.800.000	108.000.000	110,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.705.000.000</b>	<b>1.648.000.000</b>	<b>8,47</b>

*Beban Perjalanan Dinas Rp2.834.000.000*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.834.000.000 dan Rp2.781.000.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NNK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.147.000.000	1.131.000.000	1,41
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	779.600.000	760.000.000	3,95
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	653.400.000	660.000.000	0,52
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	254.000.000	250.000.000	1,60
<b>Jumlah</b>	<b>2.834.000.000</b>	<b>2.781.000.000</b>	<b>1,91</b>

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.350.000.000*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.350.000.000 dan Rp1.025.000.000. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Jayapura untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH2016	TH2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	200.000.000	150.000.000	33,33
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	700.000.000	600.000.000	40,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	450.000.000	375.000.000	20,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.025.000.000</b>	<b>31,71</b>

*Beban Bantuan Sosial  
Rp200.000.000*

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan Rp180.000.000. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH2016	TH2015	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	30.000.000	25.000.000	20,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	60.000.000	45.000.000	33,33
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	110.000.000	70.000.000	57,14
<b>Jumlah</b>	<b>200.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>42,86</b>

*Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp1.175.000.000*

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.175.000.000 dan Rp736.400.000. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.



Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2016 dan 2015*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Perabotan dan Mesin	630.100.000	450.000.000	40
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	335.900.000	199.400.000	68
Beban Penyusutan Jala, Ingasi, Janjiga	68.000.000	30.000.000	127
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	42.000.000	32.000.000	31
Jumlah Penyusutan	1.076.000.000	711.400.000	51
Beban Amortisasi Software	54.000.000	-	-
Beban Amortisasi ATR Lainnya	27.000.000	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	18.000.000	25.000.000	(28)
Jumlah Amortisasi	99.000.000	25.000.000	296
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.175.000.000</b>	<b>736.400.000</b>	<b>60</b>

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp5.030.000

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.030.000 dan Rp4.010.000. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	4.500.000	3.500.000	28,57
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	530.000	510.000	3,92
Jumlah	5.030.000	4.010.000	25,14

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp16.000.000

**D.11 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015*

URAIAN	TH2016	TH2015	NAIK (TURUN) %
Perjualan Alat Angkut	28.500.000	18.000.000	58,33
Perjualan Alat Kantor	(5.500.000)	(5.000.000)	-
Defisit Selisih Kurs	(4.000.000)	(4.500.000)	-11,11
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan <sup>*)</sup>	5.000.000	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan <sup>*)</sup>	(8.000.000)	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	16.000.000	8.500.000	88,24

*\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Defisit Pos Luar*

*Biasa*

*Rp 155.000.000*

**D.12 Defisit Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa TA 2016 dan 2015*

URAIAN	TH2016	TH2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	15.000.000	13.500.000	11,11
Beban Perjalanan Dinas	(60.000.000)	(32.000.000)	87,50
Beban Persediaan	(110.000.000)	(75.000.000)	46,67
Jumlah	(155.000.000)	(93.500.000)	65,78

Terdapat dua Kantor Akuntansi Istimewa yaitu Papua dan Merauke yang menyumbang nilai pada Pos Luar Biasa karena terjadi bencana longsor bukit dan banjir. Pendapatan PNB di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang rusak pasca bencana, sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.



**E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal* **E.1 Ekuitas Awal**  
*Rp19.778.025.000* Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp19.778.025.000 dan Rp11.139.285.000.

*Defisit LO* **E.2 Surplus (Defisit) LO**  
*Rp18.896.500.000* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah defisit sebesar Rp18.896.500.000 dan Rp16.210.010.000. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar* **E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**  
*Rp0* Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp0.

*Penyesuaian Nilai Aset* **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**  
*Rp0* Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp250.000.000. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan* **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**  
*Rp577.885.000* Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp577.885.000

dan Rp458.750.000. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	350.000.000
2. Suku Cadang	150.000.000
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	70.885.000
4. Barang Persediaan Lainnya	7.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>577.885.000</b>

*Selisih*

*Revaluasi Aset Tetap*

*Rp450.000.000*

**E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp450.000.000 dan Rp124.000.000. Selisih revaluasi aset tetap berasal dari penilaian ulang atas tanah di Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura.

*Koreksi Nilai*

*Aset Tetap Non Revaluasi*

*Rp35.000.000*

**E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp35.000.000 dan Rp82.000.000. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	27.785.000
Gedung dan Bangunan	(62.785.000)
<b>Jumlah</b>	<b>(35.000.000)</b>

*Koreksi Lain-lain*

*Rp117.115.000*

**E.3.6 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp117.115.000 dan Rp184.000.000. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	42.500.000
Koreksi Pendapatan	31.500.000
Koreksi Piutang	21.115.000
Koreksi Kewajiban	16.500.000
Koreksi Hibah	5.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>117.115.000</b>

*Transaksi Antar* **E.4 Transaksi Antar Entitas**

*Entitas*

*Rp29.880.000.000*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp29.880.000.000 dan Rp23.750.000.000. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	720.000.000
Ditagihkan ke Entitas Lain	(30.590.000.000)
Transfer Masuk	(250.000.000)
Transfer Keluar	70.000.000
Pengesahan Hibah Langsung	170.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>(29.880.000.000)</b>

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp720.000.000 sedangkan DKEL sebesar Rp30.590.000.000

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016



sebesar Rp250.000.000 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Kantor Akuntansi Denpasar	100.000.000
2	Persediaan	Deputi Akuntansi	150.000.000
	Jumlah		250.000.000

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp70.000.000 yang merupakan transfer Persediaan ke KPPN Jayapura dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

#### E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp170.000.000 dari total Rp450.000.000 yang diterima sepanjang tahun 2016.

*Ekuitas Akhir*  
Rp31.871.525.000

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Kantor Akuntansi Istimewa Papua	Uang	Rp 70.000.000
		Barang	Rp 50.000.000
2	Kantor Akuntansi Istimewa Blak	Uang	Rp 50.000.000
Total Pengesahan			Rp 170.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp 170.000.000

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Satker Tahun 2016 disajikan pada lampiran.

#### E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp31.871.525.000 dan Rp19.778.025.000.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 15 Januari 2017 telah terjadi bencana alam berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Jaringan komputer, Instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut Kepala Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua telah membentuk tim untuk mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut dan menginstruksikan untuk tetap memberikan pelayanan kepada *stakeholder*.

### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 009/BALAP.5/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 018/BALAP.5/2016 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua pada tanggal 05 Juli 2016 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Saker	Jabatan	Sebelum	Menjadi
Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura	Kuasa Pengguna Anggaran	Desry SF	Mutiara
	Pejabat Pembuat Komitmen	Fita	Syahril Fatah
	Pejabat Pembaca Tagihan/Penguji SPM	Fajar	Rizki
	Bendahara	Yessy	Sitarti
Kantor Akuntansi Istimewa Biak	Kuasa Pengguna Anggaran	Sitawijaya	Utami
	Pejabat Pembuat Komitmen	Diana	Tema
	Pejabat Pembaca Tagihan/Penguji SPM	Utama Kanya	Okto
	Bendahara	Yaniraga	Jumilia

Kantor Wilayah Akuntansi Indonesia Provinsi Papua  
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi  
dan Nilai Buku Aset Tetap  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
				Per 31-12-2016	Tahun 2016	Per 31-12-2016	Per 31-12-2016
<b>A Tanah</b>							
1	Tanah	-	12.100.000.000	-	-	-	12.100.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>12.100.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.100.000.000</b>
<b>B Peralatan dan Mesin</b>							
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	460.000.000	221.450.000	92.900.000	316.350.000	145.650.000
2	Alat Kantor	5	1.200.000.000	110.000.000	211.100.000	321.000.000	878.500.000
3	Alat Rumah Tangga	5	1.088.000.000	102.000.000	124.000.000	226.000.000	862.000.000
4	Alat Komunikasi	5	383.000.000	82.500.000	35.250.000	88.750.000	294.250.000
5	Komputer Urut	4	400.000.000	80.000.000	46.000.000	126.000.000	274.000.000
6	Peralatan Komputer	4	587.000.000	99.272.000	110.500.000	209.772.000	377.228.000
7	Peralatan Olah Raga	3	52.000.000	22.578.000	7.350.000	29.928.000	22.072.000
	<b>Jumlah</b>		<b>4.160.000.000</b>	<b>627.800.000</b>	<b>630.100.000</b>	<b>1.317.500.000</b>	<b>2.842.500.000</b>
<b>C Gedung dan Bangunan</b>							
1	Bangunan Gedung Tempal Kerja	50	7.280.000.000	1.604.000.000	139.200.000	1.743.200.000	5.536.800.000
2	Bangunan Gedung Tempal Tirggal	50	9.240.000.000	2.081.200.000	196.700.000	2.277.900.000	6.962.100.000
	<b>Jumlah</b>		<b>16.520.000.000</b>	<b>3.685.200.000</b>	<b>335.900.000</b>	<b>4.021.100.000</b>	<b>12.498.500.000</b>
<b>D Jaringan</b>							
1	Jaringan Listrik	40	84.000.000	4.500.000	13.300.000	11.800.000	66.200.000
2	Jaringan Telepon	20	596.000.000	109.750.000	54.700.000	164.450.000	431.550.000
	<b>Jumlah</b>		<b>680.000.000</b>	<b>114.250.000</b>	<b>68.000.000</b>	<b>182.250.000</b>	<b>497.750.000</b>
<b>E Konstruksi dalam Pengerjaan</b>							
1	KOP Bangunan	4	750.000.000	-	-	-	750.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>750.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>750.000.000</b>
<b>F Aset Tetap lainnya</b>							
1	Barang berwujud keserian	4	150.000.000	44.000.000	42.000.000	85.000.000	64.000.000
2	Buku dan Koleksi Kepustakaan	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>210.000.000</b>	<b>44.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>124.000.000</b>
	<b>Total</b>		<b>34.390.000.000</b>	<b>4.631.250.000</b>	<b>1.076.000.000</b>	<b>5.607.250.000</b>	<b>28.782.750.000</b>

\*) Beban amortisasi



Lampiran II : Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua  
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

No.	Uraian	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Persentase Pengerjaan	Nilai Pengerjaan	Ket
1	Gedung Tempat Kerja	KAI Papua	No.25/KWAI/VI/2015	500.000.000	75%	375.000.000	Rupiah Murni
2	Gedung Tempat Kerja	KAI Merauke	No.09/KWAI/VI/2015	500.000.000	75%	375.000.000	Rupiah Murni
Jumlah				1.000.000.000		750.000.000	

6

Lampiran III: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA  
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA  
PER 31 DESEMBER 2016

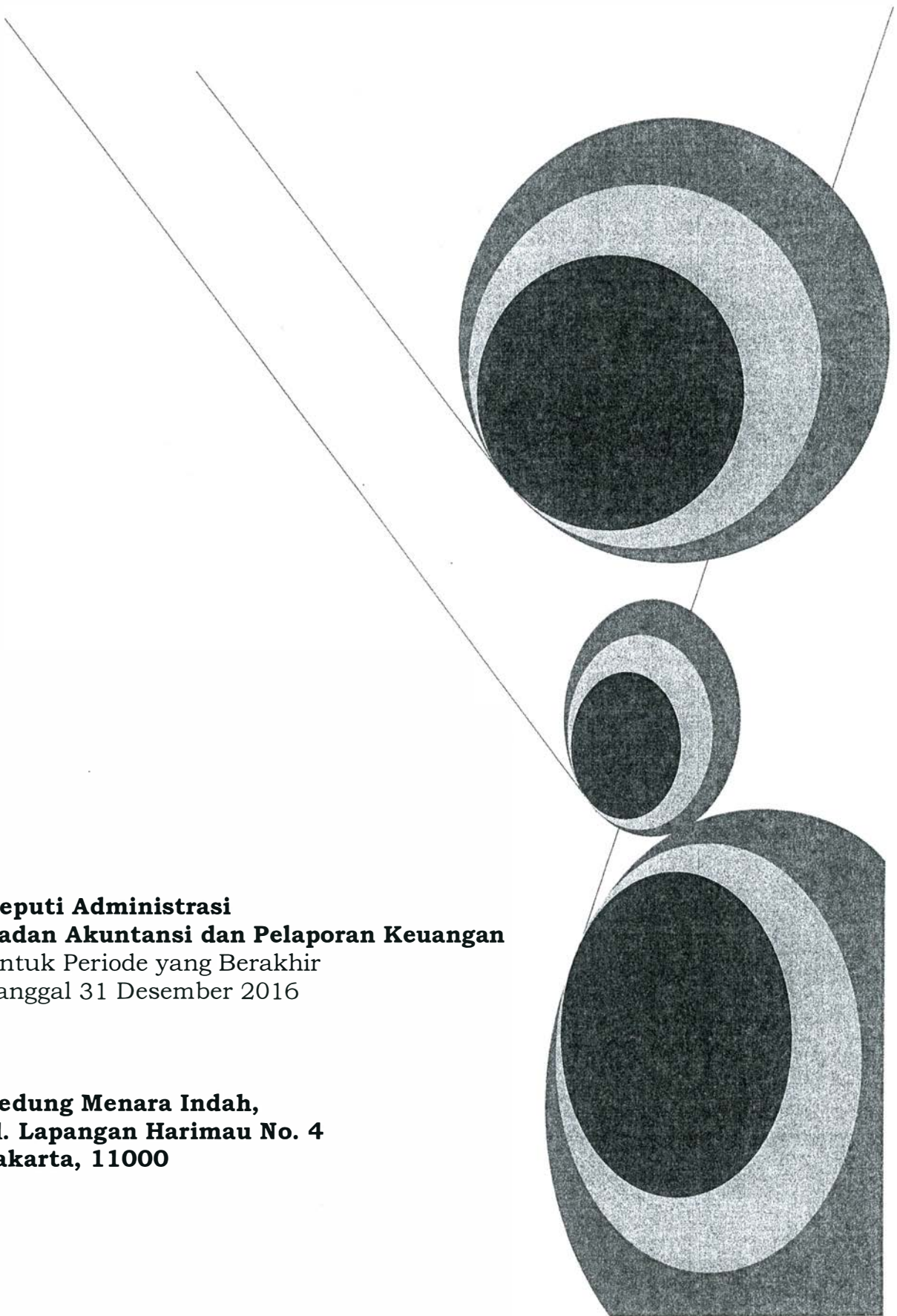
No	Nama Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket
1	Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura	Uang	DN	Rp 150.000.000	Rp 70.000.000	Rp 80.000.000	Proses Pengesahan
		Barang	DN	Rp 250.000.000	Rp 50.000.000	Rp 200.000.000	Belum Didaftarkan
2	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	Uang	LN	Rp 70.000.000	Rp 50.000.000	Rp 20.000.000	Proses Pengesahan
3	Kantor Akuntansi Istimewa Markweri	Barang	DN	Rp 200.000.000		Rp 200.000.000	Belum Didaftarkan
Jumlah				Rp 670.000.000	Rp 170.000.000	Rp 500.000.000	

C. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPA-E1



**Deputi Administrasi**  
**Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**  
Untuk Periode yang Berakhir  
Tanggal 31 Desember 2016

**Gedung Menara Indah,**  
**Jl. Lapangan Harimau No. 4**  
**Jakarta, 11000**



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Deputi Administrasi BAPK adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Deputi Administrasi BAPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Deputi Administrasi BAPK. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Februari 2017  
Kepala,

Acelin Kamila  
NIP 1965 0901 199203 2 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
M. Penjelasan Umum	x
N. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
O. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
P. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
Q. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
R. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x



**DEPUTI ADMINISTRASI BAPK  
GEDUNG MENARA INDAH, JL.LAPANGAN HARIMAU NO. 4 JAKARTA  
TELEPON 021 222065,623455, FAXIMILE 02125052277**

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,                      Februari 2017  
Kepala,

Acelin Kamila  
NIP 1965 0901 199203 2 002

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Deputi Administrasi BAPK Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.440.000.000 atau mencapai 96 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.500.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp60.974.700.000 atau mencapai 98,03 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp62.200.000.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp62.791.715.000 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.948.415.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp583.900.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp57.021.400.000; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.238.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.371.460.000 dan Rp61.420.255.000.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.026.000.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar

Rp39.324.785.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp38.298.785.000. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp32.000.000 dan Rp300.000.000 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp38.566.785.000.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp38.355.640.000 ditambah Defisit-LO sebesar Rp38.566.785.000 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp2.052.000.000 dan transaksi antarentitas senilai Rp59.579.400.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp61.420.255.000.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**DEPUTI ADMINISTRASI BAPK  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2016		% thd Angg	TA 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.500.000.000	1.440.000.000	96,00	1.300.000.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>1.440.000.000</b>	<b>96,00</b>	<b>1.300.000.000</b>
<b>BELANJA</b>	B.2				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	14.000.000.000	13.800.000.000	98,57	12.800.000.000
Belanja Barang	B.4	25.600.000.000	25.400.000.000	99,22	24.700.000.000
Belanja Modal	B.5	22.200.000.000	21.374.700.000	96,28	12.460.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	400.000.000	400.000.000	100,00	280.000.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>62.200.000.000</b>	<b>60.974.700.000</b>	<b>98,08</b>	<b>50.240.000.000</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*



**II. NERACA**

**DEPUTI ADMINISTRASI BAPK  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	40.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	12.000.000	4.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	80.000.000	36.000.000
Piutang PNB	C.4	240.000.000	220.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	144.000.000	96.000.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	48.000.000	38.400.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(13.845.000)	(7.720.000)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	604.000.000	557.000.000
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	278.300.000	334.500.000
Persediaan	C.10	2.515.960.000	1.800.000.000
Jumlah Aset Lancar		3.948.415.000	3.078.180.000
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	372.000.000	180.000.000
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	224.000.000	100.800.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	(12.100.000)	(8.040.000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		583.900.000	272.760.000
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	24.200.000.000	12.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.15	8.524.000.000	4.200.000.000
Gedung dan Bangunan	C.16	31.980.000.000	28.000.000.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	1.360.000.000	200.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	420.000.000	360.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	1.500.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(10.962.600.000)	(9.136.600.000)
Jumlah Aset Tetap		57.021.400.000	35.623.400.000
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.21	720.000.000	80.000.000
Aset Lain-Lain	C.22	780.000.000	440.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(262.000.000)	(120.000.000)
Jumlah Aset Lainnya		1.238.000.000	400.000.000
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>62.791.715.000</b>	<b>39.374.340.000</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	40.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	316.000.000	236.000.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	717.860.000	462.700.000
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	297.600.000	320.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.371.460.000	1.018.700.000
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>1.371.460.000</b>	<b>1.018.700.000</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	61.420.255.000	38.355.640.000
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>61.420.255.000</b>	<b>38.355.640.000</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>62.791.715.000</b>	<b>39.374.340.000</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**DEPUTI ADMINISTRASI BAPK  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.026.000.000	994.500.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.026.000.000</b>	<b>994.500.000</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	12.380.000.000	12.542.000.000
Beban Persediaan	D.3	8.100.000.000	8.541.000.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.994.000.000	2.212.000.000
Beban Pemeliharaan	D.5	3.982.000.000	1.775.000.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5.990.000.000	5.421.000.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	2.500.000.000	2.114.000.000
Beban Bantuan Sosial	D.8	400.000.000	350.000.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.968.600.000	1.774.100.000
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	10.185.000	8.020.000
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>39.324.785.000</b>	<b>34.737.120.000</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(38.298.785.000)</b>	<b>(33.742.620.000)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		49.000.000	30.000.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(6.000.000)	(5.000.000)
Defisit Selisih Kurs		(10.000.000)	(4.500.000)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.000.000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(9.000.000)	
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>32.000.000</b>	<b>20.500.000</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(38.266.785.000)</b>	<b>(33.722.120.000)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNB		40.000.000	28.750.000
Beban Perjalanan Dinas		(120.000.000)	(88.540.000)
Beban Persediaan		(220.000.000)	(205.000.000)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>(300.000.000)</b>	<b>(264.790.000)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(38.566.785.000)</b>	<b>(33.986.910.000)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**DEPUTI ADMINISTRASI BAPK  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2016	2015
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	38.355.640.000	21.806.450.000
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(38.566.785.000)	(33.986.910.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	291.000.000
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	737.985.000	668.000.000
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	462.130.000	160.000.000
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	537.885.000	32.000.000
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	314.000.000	445.100.000
<b>JUMLAH</b>		<b>2.052.000.000</b>	<b>1.596.100.000</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	59.579.400.000	48.940.000.000
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>61.420.255.000</b>	<b>38.355.640.000</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Deputy Administrasi BAPK

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Deputy Administrasi BAPK didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Lapangan Harimau No.4 Jakarta.

Deputy Administrasi BAPK mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan kebijakan, regulasi teknis, dan administrasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Deputy Administrasi BAPK berkomitmen dengan visi "*mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.*" Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.



- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

#### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Deputi Administrasi BAPK. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Deputi Administrasi BAPK Tahun 2016 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Deputi Administrasi BAPK yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Deputi Administrasi BAPK Pembinaan Akuntansi Instansi adalah 7 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

*Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-EI*

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	02	Deputi Administrasi	1	-	-	-	1
2	02	Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta		1	-	-	1
3	02	Kanwil Akuntansi Istimewa		1	-	-	1

4	02	Kanwil Akuntansi Istimewa Kalimantan Timur		1	-	-	1
5	02	Kanwil Akuntansi Istimewa Bali		1	-	-	1
6	02	Kanwil Akuntansi Istimewa Nusa Tenggara		1	-	-	1
7	02	Kanwil Akuntansi					
<b>Jumlah</b>			<b>1</b>	<b>11</b>			<b>12</b>

*Basis Akuntansi*

### A.3. Basis Akuntansi

Deputi Administrasi BAPK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Deputi Administrasi BAPK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya





ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Deputi Administrasi BAPK. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Deputi Administrasi BAPK adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

##### **(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - o Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - o Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:



Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (A at Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset



lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas	20

Tanaman Semusim.	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### *Kewajiban*

#### **(7) Kewajiban**

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(8) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Deputi Administrasi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2016	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	1.400.000.000	1.400.000.000
Pendapatan Lain-lain	100.000.000	100.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	13.500.000.000	14.000.000.000
Belanja Barang	32.000.000.000	25.600.000.000
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000	400.000.000
Belanja Modal	16.000.000.000	22.200.000.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>61.900.000.000</b>	<b>62.200.000.000</b>

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Deputi Administrasi maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	2016	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Kegiatan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua	29.700.000.000	30.600.000.000
Kegiatan Manajemen dan Kebijakan di Bidang Pelaporan Keuangan	11.900.000.000	12.000.000.000
Kegiatan Pelatihan di Bidang Akuntansi pada KL	20.300.000.000	19.600.000.000
<b>Total Belanja</b>	<b>61.900.000.000</b>	<b>62.200.000.000</b>

Realisasi  
Pendapatan  
Rp1.440.000.000

**B.1 PENDAPATAN**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.440.000.000 atau mencapai 96 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000. Pendapatan lingkup



Deputi Administrasi BAPK terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	1.400.000.000	1.175.000.000	83,93
Pendapatan Lain-lain	100.000.000	265.000.000	265,00
Jumlah	1.500.000.000	1.440.000.000	96,00

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 12,98% persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan jasa akuntansi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Deputi Administrasi BAPK. Selain itu, Pendapatan Lain-lain mengalami kenaikan sebesar 1,92% yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	1.175.000.000	1.040.000.000	12,98
Pendapatan Lain-lain	265.000.000	260.000.000	1,92
Jumlah	1.440.000.000	1.300.000.000	10,77

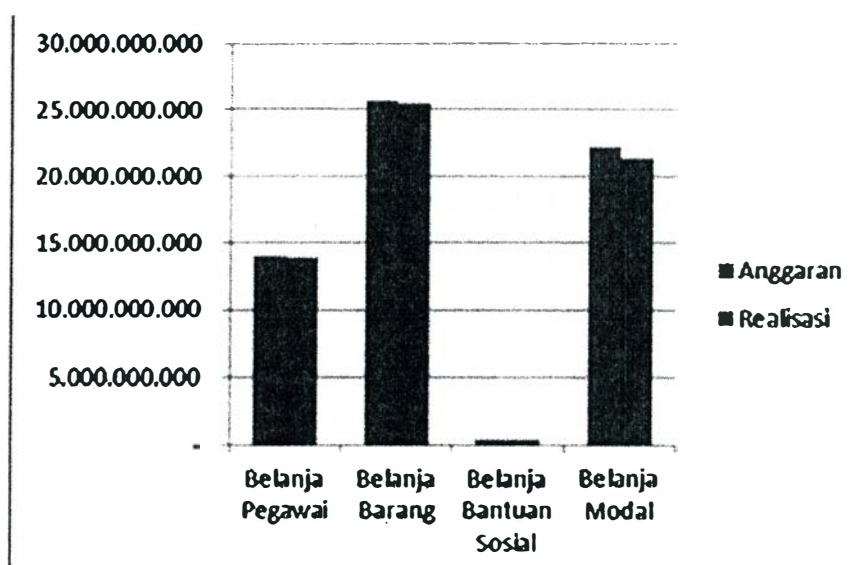
*Realisasi Belanja* **B.2. BELANJA**

*Rp60.974.700.000* Realisasi Belanja pada TA 2016 adalah sebesar Rp60.974.700.000 atau 98,03% dari anggaran belanja sebesar Rp62.200.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016*

URAIAN	2016		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	14.000.000.000	13.900.000.000	99,29
Belanja Barang	25.600.000.000	25.400.000.000	99,22
Belanja Modal	22.200.000.000	21.374.700.000	96,28
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000	400.000.000	100
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>62.200.000.000</b>	<b>61.074.700.000</b>	<b>98,19</b>
Pengembalian Belanja		1.100.000.000	0
<b>Total Belanja</b>	<b>62.200.000.000</b>	<b>60.974.700.000</b>	<b>98,03</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2016*

PROGRAM	2016		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Kegiatan Implemetasi Akuntansi Berbasis Akrual	26.144.000.000	25.860.000.000	99,91
Kegiatan Manajemen dan Kebijakan di Bidang Pelaporan Keuangan	21.754.700.000	20.146.700.000	92,60
Kegiatan Pelatihan di Bidang Akuntansi pada KL	14.301.300.000	14.969.000.000	104,67
<b>Total Belanja</b>	<b>62.200.000.000</b>	<b>60.974.700.000</b>	<b>98,03</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 21,37% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:



1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2016,
2. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja bantuan sosial untuk penduduk daerah terpencil dan perbatasan negara yang mempunyai kerawanan sosial.

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	13.800.000.000	12.800.000.000	7,81
Belanja Barang	25.400.000.000	24.700.000.000	2,83
Belanja Modal	21.374.700.000	12.460.000.000	71,55
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000	280.000.000	42,86
Jumlah	60.974.700.000	50.240.000.000	21,37

*Belanja Pegawai*  
*Rp13.800.000.000*

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp13.800.000.000 dan Rp12.800.000.000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 7,81% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi PNS.

*Ca*

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.000.000.000	9.600.000.000	4,17
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.800.000.000	1.789.000.000	0,61
Belanja Honorarium	1.200.000.000	698.000.000	71,92
Belanja Lembur	600.000.000	513.000.000	16,96
Belanja Vakasi	300.000.000	260.000.000	15,38
Jumlah Belanja Kotor	13.900.000.000	12.860.000.000	8,09
Pengembalian Belanja Pegawai	(100.000.000)	(60.000.000)	66,67
Jumlah Belanja	13.800.000.000	12.800.000.000	7,81

*Belanja Barang*  
Rp25.400.000.000

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp25.400.000.000 dan Rp24.700.000.000. Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan 2,83% dari TA 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja barang operasional peserta diklat serta pengadaan perlengkapan untuk kegiatan diklat sepanjang tahun 2016.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	10.400.000.000	6.900.000.000	60,72
Belanja Barang Non Operasional	2.234.000.000	2.820.000.000	(14,73)
Belanja Jasa	2.394.000.000	2.880.000.000	(19,12)
Belanja Pemeliharaan	1.982.000.000	6.920.000.000	(66,52)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.990.000.000	3.920.000.000	52,81
Belanja Barang untuk diselesaikan kepada Masy.	2.400.000.000	2.360.000.000	0,84
Jumlah Belanja Kotor	25.400.000.000	24.700.000.000	2,83
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	25.400.000.000	24.700.000.000	2,83

*Belanja Modal*  
Rp21.374.700.000

**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp21.374.700.000 dan Rp12.460.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mmeberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 71,55% dibandingkan TA 2015 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat



peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi, berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	11.800.000.000	6.000.000.000	96,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.400.000.000	3.000.000.000	46,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.500.000.000	2.100.000.000	66,67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.160.000.000	800.000.000	45,00
Belanja Modal Lainnya	514.700.000	560.000.000	(8,09)
Jumlah Belanja Kotor	21.374.700.000	12.460.000.000	71,55
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	21.374.700.000	12.460.000.000	71,55

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp11.800.000.000 dan Rp6.000.000.000. Realisasi TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 96,67 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengadaan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	9.200.000.000	4.400.000.000	109,09
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	720.000.000	340.000.000	111,76
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	200.000.000	300.000.000	
Belanja Modal Pengurusan dan Pematangan Tanah	1.160.000.000	640.000.000	81,25
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	520.000.000	320.000.000	62,50
Jumlah Belanja Kotor	11.800.000.000	6.000.000.000	96,67
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	11.800.000.000	6.000.000.000	96,67

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah sebesar Rp4.400.000.000, mengalami kenaikan sebesar

ck

46,67 persen bila dibandingkan dengan TA 2015 sebesar Rp3.000.000.000. Hal ini disebabkan oleh pengadaan gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.450.000.000	1.052.000.000	37,83
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	1.550.000.000	889.000.000	71,35
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	200.000.000	169.000.000	18,34
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	1.200.000.000	880.000.000	34,83
Jumlah Belanja Kotor	4.400.000.000	3.000.000.000	46,67
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.400.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>46,67</b>

**B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.500.000.000 dan Rp2.100.000.000. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari penambahan gedung tempat kerja yang digunakan untuk kegiatan pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA  
2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2016	T.A. 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.500.000.000	1.550.000.000	61,29
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	300.000.000	100.000.000	200,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	250.000.000	220.000.000	13,64
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	300.000.000	130.000.000	130,77
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	150.000.000	100.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	3.500.000.000	2.100.000.000	66,67
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>66,67</b>



**B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.160.000.000 dan Rp800.000.000. Realisasi TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 45 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis.

*Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  
TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A.2016	T.A.2015	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	1.040.000.000	720.000.000	44,44
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	120.000.000	80.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	1.160.000.000	800.000.000	45,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	1.160.000.000	800.000.000	45,00

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp514.700.000 dan Rp560.000.000. Realisasi TA 2016 mengalami penurunan sebesar 8,09 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan tidak adanya pengadaan *software* tambahan di Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya  
TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A.2016	T.A.2015	Naik (Turun) %
Belanja <i>Software</i>	394.700.000	514.200.000	-23,24
Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan	120.000.000	45.800.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	514.700.000	560.000.000	-8,09
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	514.700.000	560.000.000	-8,09

*Belanja Bantuan Sosial  
Rp400.000.000*

**B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp400.000.000 dan Rp280.000.000. Realisasi TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 42,86% dibandingkan TA 2015. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk

uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2016	T.A2015	Naik (Turun)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	198.000.000	150.000.000	32,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	112.000.000	50.000.000	124,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	90.000.000	80.000.000	12,50
Jumlah	400.000.000	280.000.000	42,86



### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp40.000.000

#### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp40.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2016 dan 2015*

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Rekening Bank	15.000.000	-
Uang Tunai	25.000.000	-
Jumlah	40.000.000	-

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing kanwil disajikan pada lampiran.

Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp12.000.000

#### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp12.000.000 dan Rp4.000.000. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2016 dan 2015*

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Uang Tunai	2.000.000	1.500.000
Rekening Bank	10.000.000	2.500.000
Jumlah	12.000.000	4.000.000

Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp80.000.000

#### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp80.000.000 dan Rp36.000.000. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas

pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kasa adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015*

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	14.000.000	6.500.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	25.000.000	14.500.000
Kas Lainnya dari Hibah	41.000.000	15.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>80.000.000</b>	<b>36.000.000</b>

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas pada kanwil disajikan dalam lampiran.

*Piutang PNB*  
*Rp240.000.000*

**C.4 Piutang PNB**

Saldo Piutang Bukan Pajak pertanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp240.000.000 dan Rp220.000.000. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Piutang PNB TA 2016 dan 2015*

Uraian	TH 2016	TH 2015
Piutang PNB	200.000.000	190.000.000
Piutang Lainnya	40.000.000	30.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>240.000.000</b>	<b>220.000.000</b>

*Bagian Lancar*  
*Tagihan TP/TGR*  
*Rp144.000.000*

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp144.000.000. dan Rp96.000.000.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang

akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:  
*Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015*

No	Nama	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Bagian Lancar TP	64.000.000	41.000.000
2	Bagian Lancar TGR	80.000.000	55.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>144.000.000</b>	<b>96.000.000</b>

Rincian TP/TGR untuk masing-masing kanwil disajikan pada lampiran

*Bagian Lancar  
TPA  
Rp48.000.000*

#### **C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp48.000.000 dan Rp38.400.000. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian TPA untuk masing-masing kanwil disajikan pada lampiran.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih - Piutang  
Lancar  
Rp13.845.000*

#### **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp13.845.000 dan Rp7.720.000.

Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar TA  
2016

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	160.000.000	0,50%	800.000
Kurang Lancar	80.000.000	10%	8.000.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>240.000.000</b>		<b>8.800.000</b>
<b>Bagian Lancar T P/T GR</b>			
Lancar	109.000.000	0,50%	545.000
Kurang Lancar	35.000.000	10%	3.500.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>144.000.000</b>		<b>4.045.000</b>
<b>Bagian Lancar T PA</b>			
Lancar	40.000.000	0,50%	200.000
Kurang Lancar	8.000.000	10%	800.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>48.000.000</b>		<b>1.000.000</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>432.000.000</b>		<b>13.845.000</b>

*Belanja Dibayar di Muka* C.8 *Beban Dibayar di Muka*

*Muka*

*Rp604.000.000*

Saldo *Beban Dibayar di Muka* per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp604.000.000 dan Rp557.000.000. *Beban dibayar di muka* merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian *Beban Dibayar di Muka* adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2016 dan 2015*

JENIS	TH 2016	TH 2015
Pembayaran Internet	154.000.000	120.000.000
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	239.100.000	280.000.000
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	210.900.000	157.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>604.000.000</b>	<b>557.000.000</b>

Rincian *Beban Dibayar di Muka* pada masing-masing kanwil disajikan pada lampiran.

**Pendapatan yang Masih Harus Diterima C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp278.300.000 dan Rp334.500.000, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2016 dan 2015*

JENIS	TH 2016	TH 2015
Pendapatan Jasa Pelatihan	155.000.000	120.000.000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	89.100.000	100.000.000
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	34.200.000	114.500.000
Jumlah	278.300.000	334.500.000

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing kanwil disajikan dalam lampiran.

**Persediaan**

Rp2.515.960.000

**C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp2.515.960.000 dan Rp1.800.000.000.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/ atau untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015*

JENIS	TH 2016	TH 2015
Barang Konsumsi	535.500.000	600.600.000
Barang untuk Pemeliharaan	506.100.000	435.500.000
Suku Cadang	620.460.000	332.500.000
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	243.000.000	200.000.000
Persediaan Lainnya	610.900.000	231.400.000
Jumlah	2.515.960.000	1.800.000.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp3.000.000 berada dalam dalam kondisi rusak dan tidak

disajikan dalam Persediaan.

Rincian Persediaan berdasarkan kanwil disajikan pada lampiran.

*Tagihan TP/TGR* **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**  
*Rp372.000.000.*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp372.000.000 dan Rp180.000.000.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian per kanwil disajikan dalam lampiran.

*Tagihan* **C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**  
*Penjualan* Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31  
*Angsuran* Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar  
*Rp224.000.000* Rp224.000.000 dan Rp100.800.000.

Rincian per kanwil disajikan dalam lampiran.

*Penyisihan* **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar**  
*Piutang Tak*

*Tertagih –* Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar  
*Piutang Non* per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing  
*Lancar* sebesar Rp12.100.000 dan Rp8.040.000. Penyisihan  
*Rp12.100.000* Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan  
estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:



Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Non Lancar TA 2016

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	Jk Panjang	Penyisihan	Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	310,000,000	0.50%	1,550,000
Kurang Lancar	62,000,000	10%	6,200,000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Juniah</b>	<b>372,000,000</b>		<b>7,750,000</b>
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	180,000,000	0.50%	900,000
Kurang Lancar	34,000,000	10%	3,400,000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Juniah</b>	<b>214,000,000</b>		<b>4,300,000</b>
<b>Juniah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>586,000,000</b>		<b>12,050,000</b>

Tanah

Rp24.200.000.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Deputi Administrasi BAPK per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp24.200.0000.000 dan Rp12.000.000.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	Rp	12.000.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	12.262.130.000
Hibah	Rp	400.000.000
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:		
Revaluasi Aset	Rp	(462.130.000)
Penghapusan	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp</b>	<b>24.200.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp</b>	<b>24.200.000.000</b>

Mutasi tambah:

- Pembelian tanah pada tahun 2016 berlokasi di provinsi yaitu Jawa Timur dan Bali.
- Hibah berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Revaluasi atas tanah dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2015.

Tanah seluas 2000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl Matoa No.17 pada Kanwil Akuntansi Istimewa Jayapura, pada tanggal pelaporan dikuasai/ digunakan oleh pihak ketiga.

Peralatan dan  
Mesin  
Rp8.524.000.000

### C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp8.524.000.000 dan Rp4.200.000.000. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp</b>	<b>4.200.000.000</b>
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	4.250.000.000
Hibah	Rp	424.000.000
Transfer Masuk	Rp	250.000.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	50.000.000
Koreksi Tambah	Rp	77.885.000
Mutasi kurang		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(150.000.000)
Penghapusan	Rp	(577.885.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp</b>	<b>8.524.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	Rp	(1.967.000.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp</b>	<b>6.557.000.000</b>

Mutasi tambah berupa:

- a. Penambahan peralatan dan mesin dari pembelian berupa:

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Komputer Unit	400.000.000
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.850.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>4.250.000.000</b>

- b. Penambahan alat rumah tangga melalui hibah sebesar Rp474.000.000.
- c. Penambahan melalui transfer masuk dari satker Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebesar Rp250.000.000.
- d. Reklasifikasi masuk dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali alat angkutan darat yang telah dihentikan penggunaannya senilai Rp50.000.000.
- e. Koreksi tambah berasal dari koreksi atas saldo awal

dengan total Rp77.885.000

Mutasi kurang, berupa:

- a. Pengurangan melalui penghentian alat pemancar dari penggunaannya sebesar Rp150.000.000 dan diklasifikasi dari aset tetap ke Aset Lain-Lain.; dan
- b. Pengurangan melalui penghapusan sebesar Rp577.885.000. merupakan penghapusan alat angkutan darat bermotor.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan  
Bangunan  
Rp31.980.000.000

### C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp31.980.000.000 dan Rp28.000.000.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>28.000.000.000</b>
Mutasi tam bah:	
P em bangunan Gedung	3.500.000.000
Koreksi pencatatan	600.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	(120.000.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>31.980.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(8.639.600.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>23.340.400.000</b>

Mutasi tambah berupa:

- a. Penambahan dari pengadaan gedung dan bangunan senilai Rp3.500.000.000 untuk pembangunan dan renovasi unit kantor kerja; dan
- b. Penambahan yang disebabkan karena koreksi nilai sebesar Rp600.000.000.

Mutasi kurang, berupa koreksi pencatatan pada gedung tempat tinggal sebesar Rp120.000.000.

Dalam aset gedung dan bangunan tidak termasuk musholla yang dibangun secara swadaya oleh pegawai Kantor Akuntansi Istimewa Jakarta lingkup Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta.



Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp1.360.000.000

#### C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.360.000.000 dan Rp200.000.0000. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>200.000.000</b>
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Informasi Teknologi	1.160.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>1.360.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(184.000.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>1.176.000.000</b>

Mutasi tambah berasal dari pengadaan jaringan teknologi informasi pada lingkup Deputy Administrasi BAPK.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp  
420.000.000

#### C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp420.000.000 dan Rp360.000.000.

<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>360.000.000</b>
Mutasi tambah:	
Penambahan Aset Tetap Lainnya	80.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	(20.000.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>420.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(172.000.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>248.000.000</b>

Mutasi tambah:

- Aset Tetap Lainnya pada tahun 2016 keseluruhannya berasal dari pengadaan sebesar Rp80.000.000 berupa koleksi buku perpustakaan.

Mutasi kurang:

- Mutasi kurang berasal dari koreksi nilai sebesar Rp20.000.000.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan* C.19 **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

*Pengerjaan*  
Rp1.500.000.000

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.500.000.000 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*  
Rp10.962.600.000

C.20 **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp10.962.600.000 dan Rp9.136.000.000.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8.524.000.000	1.967.000.000	6.557.000.000
2	Gedung dan Bangunan	31.980.000.000	8.639.600.000	23.340.400.000
3	Jalan, Tligasi dan Jaringan	1.360.000.000	184.000.000	1.176.000.000
4	Aset Tetap Lainnya	420.000.000	172.000.000	248.000.000
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>42.284.000.000</b>	<b>10.962.600.000</b>	<b>31.321.400.000</b>

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

*Aset Tak Berwujud*  
Rp720.000.000.

### C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp720.000.000 dan Rp80.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Aset Tak Berwujud TA 2016

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 553.000.000
2	ATB Lainnya	Rp 167.000.000
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2016		Rp 720.000.000

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	Rp	80.000.000
<b>Mutasi tambah:</b>		
pembelian	Rp	514.700.000
Transfer Masuk	Rp	125.300.000
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp</b>	<b>720.000.000</b>
Amortisasi	Rp	(120.000.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp</b>	<b>600.000.000</b>

Mutasi tambah:

- Pembelian aplikasi berupa manajemen piutang di lingkup Deputi Administrasi BAPK senilai Rp514.700.000; dan
- Penambahan melalui transfer masuk dari satker Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebesar Rp125.300.000.

*Aset Lain-Lain*  
Rp780.000.000

### C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp780.000.000 dan Rp440.000.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Deputi Administrasi BAPK serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:



<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>440.000.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	500.000.000
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	(100.000.000)
- penghapusan BMN	(60.000.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>780.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan	(142.000.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>638.000.000</b>

Mutasi tambah berasal dari:

- d. Penambahanyang berasal dari reklasifikasi aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya berupa:

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Mesin	200.000,000
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	300.000,000
<b>Jumlah</b>		<b>500.000,000</b>

Mutasi kurang berasal dari:

- a. Pengurangan melalui reklasifikasi ke peralatan dan mesin yang merupakan pengaktifan kembali alat angkutan darat bermotor yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp100.000.000.
- b. Pengurangan berupa penghapusan alat angkutan darat bermotor sebesar Rp60.000.000.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran.

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp262.000.000*

### **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp262.000.000 dan Rp120.000.000. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	553.000.000	87.000.000	466.000.000
2	ATB Lainnya	167.000.000	42.000.000	125.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>720.000.000</b>	<b>129.000.000</b>	<b>591.000.000</b>
B	Aset Lainnya	780.000.000	133.000.000	647.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>780.000.000</b>	<b>133.000.000</b>	<b>647.000.000</b>
	<b>Total</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>262.000.000</b>	<b>1.238.000.000</b>

Uang Muka dari  
KPPN  
Rp40.000.000

**C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp40.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp316.000.000

**C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp316.000.000. dan Rp236.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Deputy Administrasi, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, dan kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga*

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum dis etor	Rp 172.300.000
2	Potongan Pajak yang belum dis etor	Rp 47.000.000
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp 96.700.000
	<b>Total</b>	<b>Rp 316.000.000</b>

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga di masing-masing Kanwil disajikan pada lampiran.

*Pendapatan  
Diterima di Muka  
Rp717.860.000*

**C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp717.860.000 dan Rp462.700.000. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Pendapatan Diterima di Muka pada Deputi Administrasi merupakan pendapatan sewa gedung dan bangunan pada beberapa instansi. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2016*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	Rp 387.760.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Instansi Pemerintah Lainnya	Rp 202.000.000	Penyusunan Neraca Awal
Badan Lainnya	Rp 128.100.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
<b>Total</b>	<b>Rp 717.860.000</b>	

Rincian per kanwil disajikan pada lampiran.

*Beban yang  
Masih harus  
Dibayar  
Rp297.600.000*

**C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp297.600.000 dan Rp320.000.000, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2016 dan TA 2015*

Keterangan	TH 2016	TH 2015
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	36.000.000	109.400.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	154.000.000	100.200.000
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	108.600.000	110.400.000
<b>Jumlah</b>	<b>297.600.000</b>	<b>320.000.000</b>

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar berdasarkan eselon I disajikan pada lampiran

*Ekuitas  
Rp61.420.255.000*

**C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp61.420.255.000 dan Rp38.355.640.000. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang



**D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

*Pendapatan*

*FNBP*

*Rp1.026.000.000*

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp1.026.000.000 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2016 dan TA 2015*

URAIAN	TH 2016	TH 2015	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNBP lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	25.000.000	225.000.000	(62)
Pendapatan Jasa Pelatihan	606.500.000	430.000.000	41
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Petugasan	23.660.000	10.000.000	37
Jumlah Pendapatan Jasa	705.160.000	665.000.000	6
Pendapatan lain-lain			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Lalu	65.000.000	60.000.000	8
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Lalu	256.340.000	270.000.000	(5)
Jumlah Pendapatan lain-lain	321.340.000	329.500.000	(3)
<b>Jumlah</b>	<b>1.026.000.000</b>	<b>994.500.000</b>	<b>3</b>

Pendapatan Jasa berasal dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan pendapatan lain-lain LO merupakan pengembalian belanja yang berasal dari transaksi tahun 2015.

*Beban Pegawai*

*Rp12.380.000.000*

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp12.380.000.000 dan Rp12.542.000.000. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan TA 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	10.330.000.000	10.600.000.000	(3)
Beban Honorarium dan Vakasi	1.500.000.000	1.400.000.000	7
Beban Lembur	550.000.000	542.000.000	1
<b>Jumlah</b>	<b>12.380.000.000</b>	<b>12.542.000.000</b>	<b>(1)</b>

*Beban Persediaan*  
Rp8.100.000.000

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp8.100.000.000 dan 8.541.000.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan TA 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	5.758.000.000	6.360.000.000	19,32
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berdagang	1.850.000.000	1.550.000.000	19,35
Beban Persediaan Lainnya	492.000.000	641.000.000	123,24
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>8.100.000.000</b>	<b>8.541.000.000</b>	<b>15,16</b>

*Beban Barang dan Jasa*  
Rp2.994.000.000

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.994.000.000 dan Rp2.212.000.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan TA 2015*

URAIAN	TH 2016	TH 2015	% Naik (TURUN)
Beban Barang Operasional	614.800.000	600.000.000	2
Beban Barang Non Operasional	223.420.000	200.000.000	12
Beban Langganan Daya dan Jasa	435.020.000	350.000.000	24
Beban Jasa Pos dan Giro	219.080.000	200.000.000	10
Beban Jasa Konsultan	390.180.000	200.000.000	95
Beban Jasa Profesi	574.500.000	380.000.000	51
Beban Jasa Lainnya	117.000.000	92.000.000	27
Beban Aset Ekstrakomputer/Peralatan dan Mesin	115.000.000	100.000.000	15
Beban Aset Ekstrakomputer/Gedung dan Bangunan	160.000.000	50.000.000	220
Beban Aset Ekstrakomputer/Aset Tetap Lainnya	145.000.000	40.000.000	263
<b>Jumlah</b>	<b>2.994.000.000</b>	<b>2.212.000.000</b>	<b>35</b>



Beban  
Pemeliharaan  
Rp3.982.000.000

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.982.000.000 dan Rp1.775.000.000. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagaiberikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan TA 2015*

URAIAN	TH 2016	TH 2015	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.998.580.000	1.000.000.000	100
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.223.420.000	620.000.000	97
Beban Pemeliharaan Lainnya	760.020.000	155.000.000	390
Jumlah	3.982.000.000	1.775.000.000	124

Beban  
Perjalanan Dinas  
Rp5.990.000.000

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.990.000.000 dan Rp5.421.000.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	3.306.000.000	2.200.000.000	54,32
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.046.000.000	1.900.000.000	-45,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	930.000.000	800.000.000	16,25
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	620.000.000	621.000.000	19,00
Jumlah	5.990.000.000	5.421.000.000	10,90

Beban Barang  
untuk  
Diserahkan

#### D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar



kepada Masyarakat  
Rp2.500.000.000

Rp2.500.000.000 dan Rp2.114.000.000.  
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Deputi Administrasi BAPK bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan TA 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	632.000.000	400.000.000	33,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.200.000.000	1.150.000.000	4,35
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	768.000.000	564.000.000	36,17
Jumlah	2.500.000.000	2.114.000.000	18,26

Beban Bantuan Sosial  
Rp400.000.000

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp400.000.000 dan Rp350.000.000. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan TA 2015*

URAIAN	TH 2016	TH 2015	% Naik (TURUN)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	60.000.000	50.000.000	20
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	120.000.000	100.000.000	20
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	220.000.000	200.000.000	10
Jumlah	400.000.000	350.000.000	14

Beban Penyusutan dan

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun

Amortisasi  
Rp2.968.600.000

2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.968.600.000 dan Rp1.774.100.000. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 dan TA 2015*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2016	TH 2015	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.567.000.000	850.000.000	84
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	939.600.000	634.000.000	48
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	136.000.000	110.000.000	115
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	84.000.000	180.000.000	(53)
Jumlah Penyusutan	2.826.600.000	1.774.000.000	59
Beban Amortisasi Aplikasi	80.000.000	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	62.000.000	-	-
Jumlah Amortisasi	142.000.000	-	-
Beban Penyusutan Aset lain-lain	42.000.000	45.000.000	(7)
Jumlah	2.968.600.000	1.774.000.000	67

Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
tertagih  
Rp10.185.000

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp10.185.000 dan Rp8.020.000. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016 dan TA 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	6.125.000	5.000.000	23
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	4.060.000	3.020.000	34
<b>Jumlah</b>	<b>10.185.000</b>	<b>8.020.000</b>	<b>27</b>

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp32.000.000

**D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan TA 2015*

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Penjualan Peralatan dan Mesin	49.000.000	30.000.000	63,33
Penjualan Peralatan dan Mesin	(6.000.000)	(5.000.000)	20,00
Defisit Selisih Kurs	(10.000.000)	(4.500.000)	122,22
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan*)	8.000.000	-	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	(9.000.000)	-	
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>32.000.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>56,10</b>

\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2017

Pos-Pos Luar Biasa Rp300.000.000

**D.12 POS-POS LUAR BIASA**

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:



*Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa TA 2016 dan TA  
2015*

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	40.000.000	28.750.000	39,13
Beban Perjalanan Dinas	(120.000.000)	(88.640.000)	35,53
Beban Persediaan	(220.000.000)	(205.000.000)	7,32
<b>Defisit Pos Luar Biasa</b>	<b>(300.000.000)</b>	<b>(264.790.000)</b>	<b>13,30</b>

Pendapatan PNB berasal dari penjualan peralatan dan mesin yang rusak pasca bencana di Papua dan Sumatera Utara. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan adalah merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp38.355.640.000*

**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp38.355.640.000 dan Rp21.806.450.000.

*Defisit LO*  
*Rp38.566.785.000*

**E.2 Defisit LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah defisit sebesar Rp38.566.785.000 dan Rp33.986.910.000. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/ defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar*  
*Rp0*

**E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar**

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp0.

*Penyesuaian Nilai Aset*  
*Rp0*

**E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp291.000.000. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan*  
*Rp637.985.000*

**E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp637.985.000 dan Rp668.000.000. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	471.500.000
Suku Cadang	169.935.000
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	85.050.000
Barang Persediaan Lainnya	11.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>737.985.000</b>

*Selisih Revaluasi*

*Aset Tetap*

*Rp462.130.000*

**E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp462.130.000 dan Rp160.000.000. Selisih Revaluasi Aset Tetap berasal dari penilaian ulang atas Tanah di Kanwil Akuntansi Istimewa Provinsi Papua.

*Koreksi Aset*

*Tetap Non*

*Revaluasi*

*Rp737.885.000*

**E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp737.885.000 dan Rp32.000.000. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	77.885.000
Gedung dan Bangunan	480.000.000
Aset Tetap Lainnya	(20.000.000)
<b>Jumlah</b>	<b>537.885.000</b>

*Koreksi Lain-lain*

*Rp214.000.000*

**E.3.6 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp214.000.000 dan Rp445.100.000. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:



*Rincian Koreksi Lain-Lain*

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp59.534.700.000

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	69.500.000
Koreksi Pendapatan	55.000.000
Koreksi Piutang	52.000.000
Koreksi Kewajiban	22.500.000
Koreksi Hibah	15.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>214.000.000</b>

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp59.534.700.000 dan Rp48.940.000.000. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.440.000.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	60.974.700.000
Transfer Masuk	(445.300.000)
Transfer Keluar	290.000.000
Pengesahan Hibah Langsung	200.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
<b>Jumlah</b>	<b>59.579.400.000</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp1.440.000.000 sedangkan DKEL sebesar Rp60.974.700.000

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

sebesar Rp980.000.000 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Kantor Akuntansi Denpasar	(250.000.000)
2	Aset Tak Berwujud	Kementerian Agama	(125.300.000)
3	Persediaan	Deputi Akuntansi	(70.000.000)
	Jumlah		(445.300.000)

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp290.000.000 yang merupakan transfer Persediaan kepada Kanwil Akuntansi Istimewa Jawa Timur.

#### E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1	Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta	Uang	Rp 30.000.000
2	Kanwil Akuntansi Istimewa Papua	Uang	Rp 120.000.000
		Barang	Rp 50.000.000
Total Pengesahan			Rp 200.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp 200.000.000

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Kanwil Tahun 2016 disajikan pada Lampiran.

*Ekuitas Akhir*

*Rp61.420.255.000*

#### E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp61.420.255.000 dan Rp38.355.640.000.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Pada tanggal 15 Januari 2017 telah terjadi bencana alam berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Jaringan komputer, instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut Kepala Deputy Administrasi BAPK telah membentuk tim untuk mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut dan menginstruksikan untuk tetap memberikan pelayanan kepada *stakeholder*.

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 236/BALAP.5/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2016 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Deputy Administrasi BAPK pada tanggal 05 Juli 2016 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:



Saker	Jabatan	Semula	Menjadi
Kantor Akuntansi Isimewa Papua	Kuasa Pengguna Anggaran	Denny Sf	Muliana
	Pejabat Pembuat Komitmen	Fira	Syahul Fallat
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Komang	Rizki
	Bendahara	Yessy	Sulani
Kantor Akuntansi Isimewa Biak	Kuasa Pengguna Anggaran	Sulawijaya	Ulami
	Pejabat Pembuat Komitmen	Diana	Tem a
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Fajar Ulama	Oklo
	Bendahara	Yanuraga	Jumina
Kantor Akuntansi Isimewa Derpasar	Kuasa Pengguna Anggaran	Asli	Ace In Kamila
	Pejabat Pembuat Komitmen	Tra	Sugi
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Sitina	Falhin
	Bendahara	Iman	Aydin

**Deputi Administrasi BAPK**  
**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi**  
**dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016**

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
				Per 31-12-2015	Tahun 2016	Per 31-12-2016	Per 31-12-2016
<b>A Tanah</b>							
1	Tanah	-	24.200.000.000	-	-	-	24.200.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>24.200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.200.000.000</b>
<b>B Peralatan dan Meubel</b>							
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	920.000.000	294.000.000	138.000.000	432.000.000	488.000.000
2	Alat Kantor	5	2.600.000.000	188.000.000	310.000.000	498.000.000	2.102.000.000
3	Alat Rumah Tangga	5	2.704.000.000	184.000.000	231.000.000	415.000.000	2.289.000.000
4	Alat Komunikasi	5	485.000.000	79.000.000	88.500.000	167.500.000	317.500.000
5	Komputer Urut	4	800.000.000	118.000.000	76.000.000	194.000.000	606.000.000
6	Peralatan Komputer	4	934.000.000	102.000.000	131.000.000	233.000.000	701.000.000
7	Peralatan Olah Raga	3	100.000.000	35.000.000	12.500.000	47.500.000	52.500.000
	<b>Jumlah</b>		<b>8.528.000.000</b>	<b>1.006.000.000</b>	<b>567.000.000</b>	<b>1.567.000.000</b>	<b>6.961.000.000</b>
<b>C Gedung dan Bangunan</b>							
1	Bangunan Gedung Tempal Kerja	50	15.120.000.000	3.888.000.000	302.400.000	4.190.400.000	10.929.600.000
2	Bangunan Gedung Tempal Tinggal	50	16.860.000.000	4.112.000.000	337.200.000	4.449.200.000	12.410.800.000
	<b>Jumlah</b>		<b>31.980.000.000</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>639.600.000</b>	<b>8.639.600.000</b>	<b>23.340.400.000</b>
<b>D Jaringan</b>							
1	Jaringan Listrik	40	188.000.000	4.500.000	12.962.000	17.462.000	170.538.000
2	Jaringan Telepon	20	1.192.000.000	43.500.000	123.048.000	166.548.000	1.025.452.000
	<b>Jumlah</b>		<b>1.380.000.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>136.010.000</b>	<b>184.010.000</b>	<b>1.195.990.000</b>
<b>E Konstruksi dalam Pengerjaan</b>							
1	KDP Bangunan	4	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000.000</b>
<b>F Aset Tetap lainnya</b>							
1	Barang bercorak kesenian	4	300.000.000	88.000.000	84.000.000	172.000.000	128.000.000
2	Buku dan Koleksi Kepustakaan	-	120.000.000	-	-	-	120.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>420.000.000</b>	<b>88.000.000</b>	<b>84.000.000</b>	<b>172.000.000</b>	<b>248.000.000</b>
	<b>Total</b>		<b>67.584.000.000</b>	<b>9.136.000.000</b>	<b>1.826.600.000</b>	<b>10.562.600.000</b>	<b>57.021.400.000</b>

Lampiran II: Konstruksi Dalam Pengerjaan(KDP)

**Deputi Administrasi BAPK  
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016**

No	Uraian	Lokasi	Nilai Kontrak	Nilai Kontrak	Persentase Pengerjaan	Nilai Pengerjaan	Ket
1	Gedung Tempat Kerja	Kanwil AI Papua	No.25/KM/AI/MI/2015	500.000.000	75%	375.000.000	
2	Gedung Tempat Kerja	Kanwil AI Jakarta	No. 05/DA/MI/2015	1.200.000.000	25%	300.000.000	
3	Gedung Tempat Tinggal	Kanwil AI Merauke	No. 09/KM/AI/MI/2015	500.000.000	75%	375.000.000	
4	Gedung Tempat Tinggal	Kanwil AI Bali	No. 17/XI/2015	900.000.000	50%	450.000.000	
Jumlah				3.100.000.000		1.500.000.000	



Lampiran III: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

**Deputi Administrasi BAPK**  
**Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa**  
**Per 31 Desember 2016**

No	Nama Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Total Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket
1	Kamwil Akuntansi & Imewa Provinsi Jakarta	Uang	DM	Rp 150.000.000	Rp 30.000.000	Rp 120.000.000	Proses Pengesahan
		Barang	DM	Rp 160.000.000		Rp 160.000.000	Proses Pengesahan
2	Kamwil Akuntansi & Imewa Provinsi Kalimantan	Uang	LN	Rp 100.000.000		Rp 100.000.000	Proses Pengesahan
3	Kamwil Akuntansi & Imewa Provinsi Papua	Uang	DM & LN	Rp 220.000.000	Rp 70.000.000	Rp 150.000.000	Belum diregister
		Barang	DM	Rp 450.000.000	Rp 100.000.000	Rp 350.000.000	Belum diregister
Jumlah				Rp 1.060.000.000	Rp 200.000.000	Rp 860.000.000	

D. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPA

2016

**BADAN  
AKUNTANSI  
DAN  
PELAPORAN  
KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir  
31 Desember 2016

Jl. Budi Utomo. No. 6  
Jakarta - 10710





## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Februari 2017  
Kepala,

**Wulandari, CPA,MBA**

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
VII. Laporan Realisasi Anggaran	x
VIII. Neraca	x
IX. Laporan Operasional	x
X. Laporan Perubahan Ekuitas	x
XI. Catatan atas Laporan Keuangan	x
S. Penjelasan Umum	x
T. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
U. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
V. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
W. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
X. Pengungkapan Penting Lainnya	x
XII. Lampiran dan Daftar	x

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN KEUANGAN BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN**  
**KEUANGAN TAHUN 2016**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk tahun anggaran 2016 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Februari 2017

**Hermawan, CA, CPA**  
Nip.1965082519851001



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Jakarta, Februari 2017  
Kepala,

**Wulandari, CPA, MBA**

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.850.000.000 atau mencapai 126,67 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.250.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp90.812.700.000 atau mencapai 97,33 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp93.300.000.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp96.610.357.500 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp8.664.116.750; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp763.000.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp84.682.240.750; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.501.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.919.779.000 dan Rp91.690.578.500.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.014.600.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp59.905.899.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan

Operasional senilai Rp55.891.299.000. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp38.000.000 dan Rp395.000.000 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp56.248.299.000.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp56.914.378.500, ditambah Defisit-LO sebesar Rp56.248.299.000, ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp3.061.799.000 dan transaksi antarentitas senilai total Rp87.962.700.000, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp91.690.578.500.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2016		% thd Angg	TA 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.250.000.000	2.850.000.000	126,67	1.950.000.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.250.000.000</b>	<b>2.850.000.000</b>	<b>126,67</b>	<b>1.950.000.000</b>
<b>BELANJA</b>	B.2				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	19.000.000.000	18.457.200.000	97,14	19.200.000.000
Belanja Barang	B.4	40.400.000.000	39.851.000.000	98,64	37.050.000.000
Belanja Modal	B.5	33.300.000.000	31.904.300.000	95,81	18.690.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	600.000.000	600.200.000	100,03	420.000.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>93.300.000.000</b>	<b>90.812.700.000</b>	<b>97,33</b>	<b>75.360.000.000</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



**II. NERACA**

**BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	60.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	18.000.000	6.000.000
Kas pada BLU	C.3	990.000.000	150.000.000
Kas Lainnya dan Secara Kas	C.4	120.000.000	54.000.000
Investasi Jangka Pendek BLU	C.5	357.500.000	112.540.000
Piutang PNB	C.6	450.500.000	332.100.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.7	216.000.000	144.000.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.8	72.000.000	57.600.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.9	(15.377.500)	(9.668.500)
Belanja Dibayar di Muka	C.10	811.644.000	773.000.000
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.11	483.850.250	653.120.000
Persediaan	C.12	5.100.000.000	4.273.100.000
Jumlah Aset Lancar		8.664.116.750	6.545.791.500
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.13	432.000.000	244.000.000
Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	344.000.000	257.600.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.15	(13.000.000)	(10.108.000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		763.000.000	491.492.000
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.16	36.300.000.000	18.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.17	12.983.885.000	6.300.000.000
Gedung dan Bangunan	C.18	47.970.000.000	42.000.000.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.19	2.040.000.000	300.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.20	630.000.000	540.000.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.21	2.250.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	(17.491.644.250)	(14.111.664.250)
Jumlah Aset Tetap		84.682.240.750	53.028.335.750
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.23	1.690.000.000	1.045.700.000
Aset Lain-Lain	C.24	1.174.000.000	540.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(363.000.000)	(180.000.000)
Jumlah Aset Lainnya		2.501.000.000	1.405.700.000
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>96.610.357.500</b>	<b>61.471.319.250</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.26	60.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	423.000.000	254.000.000
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.28	337.079.000	186.000.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	288.400.000	141.286.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.30	925.000.000	651.935.500
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.31	354.500.000	455.440.250
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.387.979.000	1.688.661.750
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	C.32	2.531.800.000	2.868.879.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		2.531.800.000	2.868.879.000
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>4.919.779.000</b>	<b>4.557.540.750</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.33	91.690.578.500	56.914.378.500
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>91.690.578.500</b>	<b>56.914.378.500</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>96.610.357.500</b>	<b>61.471.319.250</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2016	2015
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
	D.1		
Pendapatan PNPB Lainnya		1.539.000.000	1.351.000.000
Pendapatan Badan Layanan Umum		2.475.600.000	2.262.000.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>4.014.600.000</b>	<b>3.613.000.000</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	19.820.000.000	18.239.450.000
Beban Persediaan	D.3	12.000.000.000	13.215.000.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.614.000.000	6.142.000.000
Beban Pemeliharaan	D.5	5.200.000.000	2.015.400.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	9.087.000.000	6.745.000.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	3.857.000.000	3.684.100.000
Beban Bantuan Sosial	D.8	600.200.000	750.000.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.703.000.000	2.154.800.000
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	24.699.000	10.250.000
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>59.905.899.000</b>	<b>52.956.000.000</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(55.891.299.000)</b>	<b>(49.343.000.000)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
	D.11		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		72.000.000	66.300.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(9.000.000)	-
Defisit Selisih Kurs		(24.000.000)	(22.500.000)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		10.000.000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(11.000.000)	
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>38.000.000</b>	<b>43.800.000</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(55.853.299.000)</b>	<b>(49.299.200.000)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		95.000.000	195.400.000
Beban Perjalanan Dinas		(198.000.000)	(150.000.000)
Beban Luar Biasa		(292.000.000)	(305.100.000)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>(395.000.000)</b>	<b>(259.700.000)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(56.248.299.000)</b>	<b>(49.558.900.000)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2016	2015
EKUITAS AWAL	E.1	56.914.378.500	30.664.198.500
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(56.248.299.000)	(49.558.900.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MEN GURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	385.000.000
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	873.685.000	764.580.000
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	638.114.000	350.000.000
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	523.885.000	(125.000.000)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	576.115.000	1.024.500.000
JUMLAH		<b>2.611.799.000</b>	<b>2.399.080.000</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	88.412.700.000	73.410.000.000
EKUITAS AKHIR	E.5	<b>91.690.578.500</b>	<b>56.914.378.500</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara/Lembaga. Entitas berkedudukan di Jalan Budi Utomo Nomor: 6, Jakarta Pusat.

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara akuntansi pemerintahan pusat dan pemberian bimbingan serta dukungan teknis dalam rangka implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berkomitmen dengan visi *"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual"*.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem informasi yang andal dan

terpercaya.

- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (BAPK) terdiri dari 4 Deputi yaitu:

1. Sekretariat Utama

Deputi yang bertanggungjawab berkenaan dengan administrasi dan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa.

2. Deputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Bertanggungjawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

3. Deputi Sistem dan Peraturan Akuntansi

Bertanggungjawab terhadap penyusunan sistem dan kebijakan akuntansi.

4. Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bertanggungjawab terhadap pembinaan sistem dan kebijakan akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga.

Rincian jumlah satker pada masing-masing eselon I adalah sebagai berikut:

No.	Eselon I	Satker
1	Deputi Administrasi BAPK	12
2	Deputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	2
3	Deputi Sistem dan Peraturan Akuntansi	1
4	Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	5
Jumlah		20

Termasuk di dalam jumlah satker pada Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah dua satker BLU yaitu BLU Pusat Akuntansi dan Sekolah Tinggi Akuntansi Nasional.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

#### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Laporan



Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis*

### **A.3. Basis Akuntansi**

*Akuntansi*

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

*Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang

asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

*Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

*LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-*

##### **(2) Pendapatan- LO**

*LO*

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

- o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di



neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/ Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat